



PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	222.765.883.426,00	248.944.404.487,59	111,75%	252.048.754.413,59

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp248.944.404.487,59 atau mencapai 111,75% yang berarti Rp26.178.521.061,59 atau 11,75% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp222.765.883.426,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2020 sebesar Rp248.944.404.487,59 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp252.048.754.413,59 terjadi penurunan sebesar Rp3.104.349.926,00 atau 1,23%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	76.350.000.000,00	90.291.466.033,37	118,26%	91.077.191.655,45
Retribusi Daerah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44%	20.301.325.919,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.092.455.426,00	15.216.268.562,40	100,82%	14.641.711.340,55
Lain-lain PAD yang sah	115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59
Total	222.765.883.426,00	248.944.404.487,59	111,75%	252.048.754.413,59

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	76.350.000.000,00	90.291.466.033,07	118,26%	91.077.191.655,45

Realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp90.291.466.033,07 atau mencapai 118,26 % yang berarti Rp13.941.466.033,07 atau 18,26% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp76.350.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp90.291.466.033,07 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 Rp91.077.191.655,45 terjadi penurunan sebesar Rp785.725.622,38 atau 0,86%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.
Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Pajak hotel	3.608.000.000,00	4.372.533.671,20	121,19%	6.626.179.761,00
2. Pajak restoran	10.100.000.000,00	11.403.756.266,81	112,91%	12.986.705.054,18
3. Pajak hiburan	737.000.000,00	836.732.808,00	113,53%	2.332.473.974,00
4. Pajak reklame	1.530.000.000,00	1.928.783.033,00	126,06%	1.837.373.634,87
5. Pajak penerangan	19.600.000.000,00	20.664.839.579,46	105,43%	20.627.903.089,64
6. Pajak parkir	750.000.000,00	808.361.637,00	107,78%	1.911.580.014,00
7. Pajak air tanah	275.000.000,00	329.465.566,60	119,81%	330.002.129,20
8. BPHTB	21.500.000.000,00	27.567.526.535,00	128,22%	23.753.115.140,56
9. PBB	18.250.000.000,00	22.379.466.936,00	122,63%	20.671.858.858,00
Total	76.350.000.000,00	90.291.466.033,07	118,26%	91.077.191.655,45

1. Realisasi pajak hotel sebesar Rp4.372.533.671,20 atau mencapai 121,19% yang berarti Rp764.533.671,20 atau 21,19% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.608.000.000,00.

Perincian realisasi pajak hotel untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.1
Pajak Hotel

Pajak Hotel	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	24.765.560,00	11.947.060,00	48,24%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	4.365.228.091,20	4.360.586.611,20	99,89%
Total	4.389.993.651,20	4.372.533.671,20	99,60%

Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.372.533.671,20 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp6.626.179.761,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp2.253.646.089,80 atau 34,01%.

2. Realisasi pajak restoran sebesar Rp11.403.756.266,81 atau mencapai 112,91 % yang berarti Rp1.303.756.266,81 atau 12,91% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.100.000.000,00.

Perincian realisasi pajak restoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.2
Pajak Restoran

Pajak Restoran	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	93.601.832,00	22.541.332,00	24,08%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	11.479.252.099,81	11.381.214.934,81	99,15%
Total	11.572.853.931,81	11.403.756.266,81	98,54%

Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2020 sebesar 11.403.756.266,81 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp12.986.705.054,18 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.582.948.787,37 atau 12,19%.

3. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2020 sebesar Rp836.732.808,00 atau mencapai 113,53% yang berarti Rp99.732.808,00 atau 13,53% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp737.000.000,00.

Perincian realisasi pajak hiburan untuk periode yang berakhir 31Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.3
Pajak Hiburan

Pajak Hiburan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	36.287.250,00	21.722.250,00	59,86%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	827.689.008,00	815.010.558,00	98,47%
Total	863.976.258,00	836.732.808,00	96,85%

Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2020sebesar Rp836.732.808,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2019 sebesar Rp2.332.473.974,00atau terjadi penurunan sebesar Rp1.495.741.166,00 atau 64.13%. Masa pandemi convid19 menyebabkan pajak hiburan turun dratis karena tidak boleh beroperasi.

4. Realisasi pajak reklame sebesar Rp1.928.783.033,00 atau mencapai 126,06% yang berarti sebesar Rp398.783.033,00 atau 26,06% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.530.000.000,00.

Perincian realisasi pajak reklame untuk periode yang berakhir 31Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.4
Pajak Reklame

Pajak Reklame	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	108.259.580,00	78.140.120,00	72.18%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	1.912.823.168,00	1.850.642.913,00	96,75%
Total	2.021.082.748,00	1.928.783.033,00	95,43%

Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.928.783.033,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2019 sebesar Rp1.837.373.634,87 atau terjadi peningkatan sebesar Rp91.409.398,13 atau 4,98%.

5. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp20.664.839.579,46 atau mencapai 105,43% yang berarti Rp1.064.839.579,46 atau 5,43% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.600.000.000,00.

Perincian realisasi pajak penerangan jalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.5
Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	1.916.114.552,82	1.916.114.552,82	100%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	18.748.724.909,14	18.748.725.026,64	110,22%
Total	20.664.839.461,96	20.664.839.579,46	100%

Pencapaian pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.664.839.579,46 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2019 sebesar Rp20.627.903.089,64 atau terjadi peningkatan sebesar Rp36.936.489,82 atau 0,18%.

6. Realisasi pajak parkir sebesar Rp808.361.637,00 atau mencapai 107,78% yang berarti Rp58.361.637,00 atau 7,78% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp750.000.000,00.

Perincian realisasi pajak parkir untuk periode yang berakhir 31Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.6
Pajak Parkir

Pajak Parkir	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	750.000,00	750.000,00	100%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	830.758.304,00	807.611.637,00	97,24%
Total	831.508.304,00	808.361.637,00	97,24%

Pencapaian pajak parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2020 sebesar Rp808.361.637,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2019 sebesar Rp1.911.580.014,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.103.218.377,00 atau 57.71%.

7. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp329.465.566,60 atau mencapai 119,81% yang berarti Rp54.465.566,60 atau 19,81% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp275.000.000,00.

Perincian realisasi pajak air tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.7
Pajak Air Tanah

Pajak Air tanah	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	29.180,00	0,00	0%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	329.489.031,60	329.465.546,60	99,99%
Total	329.518.211,60	329.465.566,60	99,98%

Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp329.465.566,60 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2019 sebesar Rp330.002.129,20 terjadi penurunan sebesar Rp536.562,60 atau 0.16%.

8. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp27.567.526.535,00 atau mencapai 128,22% yang berarti Rp6.067.526.535,00 atau 28,22% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp21.500.000.000,00.

Perincian realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.8
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	27.567.526.535,00	27.567.526.535,00	100%
Total	27.567.526.535,00	27.567.526.535,00	100%

Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp27.567.526.535,00 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp23.753.115.140,56 atau terjadi peningkatan sebesar Rp3.814.411.394,44 atau 16,06%.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22.379.466.936,00 atau mencapai 122,63% yang berarti Rp4.129.466.936,00 atau 22,63% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp18.250.000.000,00.

Perincian realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode yang berakhir 31Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.9
Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2019	7.655.170.056,00	1.421.963.475,00	14,17%
2. Pendapatan LO / SKP 2020	24.732.653.246,00	20.957.503.461,00	62,79%
Total	32.387.823.302,00	22.379.466.936,00	58,56%

Pencapaian target kinerja PBB dipengaruhi adanya peningkatan kinerja petugas pemungut pajak dan petugas penagih piutang PBB sampai dengan tahun 2020

Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2020sebesar Rp22.379.466.936,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2019 sebesar Rp20.671.858.858,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.707.608.078,00 atau 8,26%.

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44%	20.301.325.919,00

Realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp15.619.539.719,00 atau 98,44% yang berarti Rp248.119.281,00 atau 1,56% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.867.659.000,00. Realisasi retribusi daerah anggaran 2020 sebesar Rp15.619.539.719,00 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.301.325.919,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.681.786.200,00 atau lebih rendah sebesar 23,06%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.2.01. Jasa Umum	6.518.635.000,00	6.004.754.409,50	92,12%	7.701.829.190,00
4.1.2.02. Jasa Usaha	8.347.224.000,00	8.786.735.909,50	105,27%	10.663.257.504,00
4.1.2.03. Perizinan tertentu	1.001.800.000,00	828.049.400,00	82,66%	1.936.239.225,00
Jumlah	15.867.659.000,00	15.619.539.719,00	98,44 %	20.301.325.919,00

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji dibawah ini.

1. 4.1.2.01	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi Jasa Umum	<u>6.518.635.000,00</u>	<u>6.004.754.409,50</u>	<u>92,12 %</u>	<u>7.701.829.190,00</u>
a. 4.1.2.01.02.				
Retribusi Pelayanan Persampahan/	136.803.000,00	176.011.500,00	128,66%	227.944.000,00
Dinas lingkungan Hidup	136.803.000,00	176.011.500,00	128,66%	227.944.000,00

➤ Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp176.011.500,00 atau mencapai 128,66 % yang berarti Rp39.208.500,00 atau 28,66% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp136.803.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2020 sebesar Rp176.011.500,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2019 sebesar Rp 227.944.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp51.932.500,00 atau 22,78%.

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
b.4.1.2.01.05Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	<u>1.880.250.000,00</u>	<u>1.483.688.612,50</u>	<u>78,89%</u>	<u>2.761.329.000,00</u>
	1.880.250.000,00	1.483.381.612,50	78,89%	2.761.329.000,00
Dinas Perhubungan				
	1.880.250.000,00	1.483.688.612,50	78,89%	2.761.329.000,00

➤ Dinas Perhubungan

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.483.381.612,50 atau mencapai 21,11% yang berarti Rp396.868.387,50 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.880.250.000,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.483.381.612,50 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sebesar Rp2.761.329.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.277.947.387,50 atau 46,28 %. Hal ini disebabkan penurunan jumlah kunjungan ke pusat perdagangan dan wisata di kota Madiun karena kondisi wabah covid-19 yang ditetapkan menjadi bencana nasional sehingga menyebabkan penurunan di segala bidang aktivitas utamanya perdagangan dan wisata yang memberlakukan pembatasan aktivitas usaha dan jam operasi di kota Madiun.

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
c.4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar	<u>3.810.190.000,00</u>	<u>3.565.623.620,00</u>	<u>93,58%</u>	<u>4.170.236.890,00</u>
Dinas Perdagangan	3.810.190.000,00	3.565.623.620,00	93,58%	4.170.236.890,00

	Anggaran2020	Realisasi2020	%	Realisasi2019
d.4.1.2.02.09Retribusi Ulang Tera	<u>61.060.000,00</u>	<u>66.236.980,00</u>	<u>108,48%</u>	<u>67.322.500,00</u>
Dinas Perdagangan	61.060.000,00	66.236.980,00	108,48%	67.322.500,00

➤ **Dinas Perdagangan**

- ☑ Realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.565.623.620,00 atau mencapai 93,58% yang berarti atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3.810.190.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.565.623.620,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 4.170.236.890,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp604.613.270,00 atau 14,50 %. Hal ini disebabkan karena kondisi wabah covid-19 yang kemudian ditetapkan menjadi bencana nasional sehingga menyebabkan penurunan aktivitas di segala bidang utamanya perdagangan dan wisata yang memberlakukan pembatasan aktivitas usaha dan jam operasi di kota Madiun.
- ☑ Realisasi retribusi ulang tera sebesar Rp66.236.980,00 atau mencapai 108,48% yang berarti Rp5.176.980,00 atau 8,48% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp61.060.000,00. dibandingkan dengan realisasi retribusi pasar tahun 2019 sebesar Rp67.322.500,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.085.520,00 atau 1,61%. Hal ini sesuai dengan potensi riil.

**f. 4.1.2.01.10
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi.**

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	<u>156.332.000,00</u>	<u>207.139.897,00</u>	<u>132,50%</u>	<u>0,00</u>
Dinas Komunikasi dan Informatika	156.332.000,00	207.139.897,00	132,50%	0,00

➤ **Dinas Komunikasi dan Informatika**

- ☑ Realisasi retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp207.139.897,00 atau mencapai 132,50% yang berarti Rp50.807.897,00 atau 32,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp156.332.000,00.

e. 4.1.2.01.07	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi	<u>474.000.000,00</u>	<u>506.360.800,00</u>	<u>106,83</u>	<u>474.996.800,00</u>
Pengujian				
Kendaraan				
Dinas Perhubungan	474.000.000,00	506.360.800,00	106,83	474.996.800,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp506.360.800,00 atau mencapai 106,83% yang berarti Rp32.360.800,00 atau 6,83% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp474.000.000,00.

Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2020 sebesar Rp506.360.800,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar Rp474.996.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp31.364.000,00 atau 6,60 %.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

L A P O R A N K E U A N G A N T A H U N 2 0 2 0

	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi Jasa Usaha	<u>8.347.224.000,00</u>	<u>8.786.735.909,50</u>	<u>105,27 %</u>	<u>10.663.257.504,00</u>
a. 1.2.02.01				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<u>7.023.356.000,00</u>	<u>7.210.792.116,50</u>	<u>102,67%</u>	<u>8.442.093.638,00</u>
Dinas Perkerjaan Umum	10.000.000,00	10.005.000,00	100,05	543.010.000,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda & Olah Raga	150.000.000,00	254.625.000,00	169,75%	0,00
Dinas Perhubungan	30.000.000,00	51.079.740,00	170,27%	51.124.800,00
Badan Kepegawaian	70.000.000,00	96.875.000,00	138,39%	325.125.000,00
BPKAD	4.187.200.000,00	3.883.245.156,50	92,74%	4.635.854.533,00
Kec. Kartoharjo	1.200.000.000,00	1.307.796.690,00	108,98%	1.332.168.820,00
Kec. Manguharjo	647.000.000,00	659.221.080,00	101,89%	646.240.455,00
Kec. Taman	700.000.000,00	918.887.850,00	131,27%	886.804.230,00
Dinas Pertanian	29.067.000,00	29.056.600,00	99,96%	21.765.800,00

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 10.005.000,00 atau mencapai 100,05% yang berarti Rp5.000,00 atau 0,05,% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 10.005.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp543.010.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp533.005.000,00 atau 98,16%. Hal ini dikarenakan adanya reklas realisasi asrama haji ke Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

➤ **Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp254.625.000,00 atau mencapai 169,75% yang berarti Rp104.625.000,00 atau 69,75% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya reklas dari realisasi arsrama haji yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum beralih ke dinas kebudayaan, pariwisata, kebudayaan dan olah raga.

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp51.079.740,00 atau mencapai 170,27% yang berarti Rp21.079.740,00 atau 70,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp30.000.000,00.
- Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp51.079.740,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar Rp51.124.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp45.060,00 atau 0,09 %.

➤ **Badan Kepegawaian**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.96.875.000,00 atau mencapai 138,39% yang berarti Rp.26.875.000,00 atau lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp70.000.000,00.
- Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.96.875.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp325.125.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp.228.250.000,00 atau 70,20%.

➤ **BPKAD**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp3.883.245.156,50 atau mencapai 92,74% yang berarti Rp 304.043.843,50 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.187.200.000,00. Realisasi ini terdiri atas pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT). Pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.883.245.156,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp4.635.854.533,00 atau terjadi Penurunan sebesar Rp752.609.376,50 atau 16,23%. Hal ini disebabkan kontribusi tetap di tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.250.000.000,00 dari Plaza Lawu Madiun yang dikelola oleh PT Sri Tanjung Megatama yang seharusnya dibayar pada tanggal 28 Desember 2020 belum terbayarkan dengan alasan pandemi covid.

➤ **Kecamatan Kartoharjo**

- ☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan kartoharjo sebesar Rp1.307.796.690,00 atau mencapai 108,98% yang berarti Rp107.796.690,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.200.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp6.000.000,00 dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp. 1.301.796.690,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.307.796.690,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp1.332.168.820,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp24.372.130,00 atau 1,83%.

➤ **Kecamatan Manguharjo**

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan manguharjo sebesar Rp659.221.080,00 atau mencapai 101,89% yang berarti Rp12.221.080,00 atau lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp647.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan manguharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp4.500.000,00. dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp.654.721.080,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp659.221.080,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp646.240.455,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp12.980.625,00 atau 2,01%.

➤ Kecamatan Taman

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan taman sebesar Rp918.887.850.000,00 atau mencapai 131,27% yang berarti Rp218.887.850,00 atau 31,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp700.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan taman berupa sewa bengkok untuk ditanami padi dan sewa gedung kecamatan. Realisasi sewa gedung kecamatan sebesar Rp6.000.000,00 dan realisasi sewa bengkok sebesar Rp.912.887.850,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp918.887.850,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp886.804.230,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp32.083.620,00 atau 3,62%.

➤ Dinas Pertanian

- ☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas pertanian sebesar Rp29.056.600,00 atau mencapai 99,96% yang berarti Rp10.400,00 atau 0,04% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.067.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.056.600,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp21.765.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp7.290.800,00 atau 33,50%.

c.4.1.2.02.04Retribusi Tempat Khusus Parkir	Anggaran2020	Realisasi 2020		Realisasi 2020
	<u>550.000.000,00</u>	<u>751.334.000,00</u>	<u>136,61%</u>	<u>992.301.956,00</u>
Dinas Perhubungan	550.000.000,00	751.334.000,00	136,61 %	992.301.956,00

➤ Dinas Perhubungan

- ☑ Realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp751.334.000,00 atau mencapai 136,61% yang berarti Rp201.334.000,00 atau 36,61% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp550.000.000,00. Realisasi ini sesuai potensi riil. Retribusi tempat khusus parkir meliputi lahan parkir parkir Sumber Umis. Hal ini sesuai dengan potensi riil.
- Realisasi tempat parkir khusus tahun anggaran 2020 sebesar Rp751.334.000,00 dibandingkan dengan realisasi tempat parkir khusus tahun 2019 sebesar Rp992.301.956,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp240.967.956,00 atau 24,28 %.

d. 4.1.2.02.05	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
Retribusi Rumah Potong Hewan	<u>37.400.000,00</u>	<u>37.110.000,00</u>	<u>99,22%</u>	<u>40.418.000,00</u>
Dinas Pertanian	37.400.000,00	37.110.000,00	99,22%	40.418.000,00

➤ Dinas Pertanian

- ☒ Realisasi retribusi rumah potong hewan sebesar Rp 37.110.000,00 atau mencapai 99,22% yang berarti Rp290.000,00 0,78% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.37.400.000,00.

Realisasi retribusi rumah potong hewan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.110.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2019 sebesar Rp40.418.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp3.308.000,00 atau 8,18%.

e.4.1.2.02.06	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Tempat Rekreasi dan Olah Raga	<u>736.468.000,00</u>	<u>787.499.793,00</u>	<u>106,93%</u>	<u>1.188.443.910,00</u>
Dinas Perkim	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	87.543.740,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda & Olah Raga	735.468.000,00	786.499.793,00	106,93%	200.425.561,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	900.474.619,00

➤ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- ☒ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.000.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2019 sebesar Rp87.543.740,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp86.543.740,00 atau 98,86%

➤ **Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga**

- ☑ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp786.499.793,00 atau mencapai 106,93% yang berarti Rp51.031.793,00 atau 6,93% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp735.468.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2020 sebesar Rp786.499.793,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2019 sebesar Rp200.425.551,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp586.074.242,00 atau 292,41% .

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

- ☑ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2020 tidak ada realisasi karena dipindahkan ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah raga

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu untuk periode yang berakhir 30 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji dibawah ini.

3. 4.1.2.03	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi Perizinan Tertentu	<u>1.001.800.000,00</u>	<u>828.049.400,00</u>	<u>82.66%</u>	<u>1.936.239.225,00</u>
a. 4.1.2.03.01	<u>1.000.000.000,00</u>	<u>826.249.400,00</u>	<u>82,62%</u>	<u>1.934.259.225,00</u>
Retribusi Mendirikan Bangunan				
Dinas Perkerjaan Umum	1.000.000.000,00	826.249.400,00	82,62%	1.934.259.225,00

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

- ☑ Realisasi retribusi IMB sebesar Rp826.249.400,00 atau mencapai 82,62% yang berarti Rp173.750.600,00 atau 17,38,% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2020 sebesar Rp 826.249.400,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2019 sebesar Rp1.934.259.225,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.108.009.825,00 atau 57,28%.

d. 4.1.2.03.04	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1.980.000,00</u>
Retribusi Izin Trayek				
Dinas Perhubungan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.980.000,00

➤ **Dinas Perhubungan**

- ☒ Realisasi izin trayek sebesar Rp1.800.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.800.000,00.

Realisasi izin trayek tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.800.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2019 sebesar Rp1.980.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp180.000,00 atau 9,09%.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.092.455.426,00	15.216.268.562,40	100,82%	14.641.711.340,55

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp15.216.268.562,40 atau 100,82% yang berarti 0,82% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.092.455.426,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.3.01.01 PDAM	6.550.840.385,00	6.550.840.385,00	100%	5.711.547.090,00
4.1.3.01.02 BPR Bank Daerah	1.238.131.353,00	1.361.944.488,00	110%	2.121.736.367,05

L A P O R A N K E U A N G A N T A H U N 2 0 2 0

4.1.3.01.03	841.578.307,00	841.578.308,00	100%	693.742.600,00
Aneka Usaha				
4.1.3.02.01	6.461.905.381,00	6.461.905.381,40	100%	6.114.685.283,50
Bank Jatim				
Total	15.092.455.426,00	15.216.268.562,40	100,82%	14.641.711.340,55

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM sebesar Rp6.550.840.385,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 dari PDAM dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2020 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM anggaran 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun 2019 sebesar Rp5.711.547.090,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp839.293.295,00 atau 14,69%.

2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah sebesar Rp1.361.944.488,00 atau mencapai 110,00% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.238.131.353,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 dari PD. BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Pasar per 31 Desember 2020 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.361.944.488,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05 atau terjadi penurunan sebesar Rp 759.791.879,05 atau 35,81%.

3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha sebesar Rp841.578.308,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp841.578.308,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2020

target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 841.578.307,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2020 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha per 31 Desember 2020 yang telah diaudit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun sebesar Rp6.461.905.381,40 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.461.905.381,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.461.905.381,40 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2019 sebesar Rp6.114.685.283,50 atau terjadi peningkatan sebesar Rp347.220.097,90 atau 5,68%.

Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya Tahun Buku 2020 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2020

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp127.817.130.173,12 atau 110,71% yang berarti Rp12.361.361.173,12 atau 10,71% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp115.455.769.000,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.1.1
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.1 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.4.01				
Hasil Penjualan aset Daerah Yang tidak dipisahkan	25.000.000,00	37.410.000,00	149,64%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	1.500.000.000,00	1.355.620.963,85	90,37%	1.516.423.603,09
c. 4.1.4.03				
Bunga deposito	9.000.000.000,00	9.026.027.396,74	100,29%	18.141.780.820,88
d. 4.1.1.06				
Denda keterlambatan pelaksanaan keg	0,00	3.782.676,00	00,00%	847.441.442,46
e. 4.1.4.10				
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	00,00%	104.875.185,41
f. 4.1.4.12				
Pendapatan dari Angsuran /cicilan penjualan	192.000.000,00	21.387.200,00	11,14%	108.519.300,00
g. 4.1.4.13				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	128.290.315,83	128,29	125.232.086,26
h. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	1.260.672.058,95	00,00%	1.742.072.107,84
i. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	104.638.769.000,00	115.885.942.419,43	110,75%	103.063.149.555,09
j. Pendapatan BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
k. Denda Pajak	0,00	97.997.142,32	0,00	369.660.147,56
l. Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	9.371.250,00

4.1.1 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Jumlah	115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.1.2

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
1 Dinas Kesehatan	9.638.769.000,00	9.912.132.642,25	102,84%	10.966.974.494,28
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	9.638.769.000,00	9.912.132.642,25	102,84%	10.966.974.494,28
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
2 RSUD	95.000.000.000,00	105.973.809.777,18	111,75%	92.096.175.060,81
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.15				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	95.000.000.000,00	105.973.809.777,18	111,75%	92.096.175.060,81
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
3BAPENDA	0,00	97.997.142,32	00,00%	369.660.147,56
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Denda Pajak	0,00	20.258,32	00,00%	369.660.147,56
f. 4.1.4.15				
Pendapatan Lain Lain	0,00	97.976.884,00	00,00%	0,00

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
4 BPKAD (SKPKD)	10.600.000.000,00	11.774.393.411,37	111,08%	22.477.825.245,94
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	1.500.000.000,00	1.355.620.963,85	90,37%	1.516.423.603,09
c. 4.1.4.03				
Bunga Deposito	9.000.000.000,00	9.026.027.396,74	100,29%	18.141.780.820,88
d. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	100.000.000,00	128.290.315,83	128,29%	125.232.086,26
f. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	1.220.393.268,95	0,00%	1.742.072.107,84
g. 4.1.4.10				
Pendapatan dari pengembalian		40.278.790,00	0,00%	104.875.185,41
h. 4.1.4.06				
Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan	0,00	3.782.676,00	00,00%	847.441.442,46
i. 4.1.4.15				
Pendapatan Denda Reribusi	0,00	0,00	00,00%	0,00
5 BPKAD	0,00	0,00	00,00%	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.03				
Bunga Deposito	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. 4.1.4.10				
Pendapatan dari pengembalian	0,00	0,00	00,00%	0,00
h. 4.1.4.06				
Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan	0,00	0,00	00,00%	0,00
i. 4.1.4.15				
Pendapatan Denda Reribusi	0,00	0,00	00,00%	0,00
6 Dinas Pertanian KP	25.000.000,00	37.410.000,00	149,64%	25.017.000,00
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	25.000.000,00	37.410.000,00	149,64%	25.017.000,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00

Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	0,00%	0,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
7 Dinas Perdagangan	192.000.000,00	21.387.200,00	11,14%	83.502.300,00
a. 4.1.4.01				
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. 4.1.4.02				
Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. 4.1.4.12				
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	192.000.000,00	21.387.200,00	11,14%	83.502.300,00
d. 4.1.4.13				
Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. 4.1.4.14				
Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. 4.1.4.15				
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
Total	115.455.769.000,00	127.817.130.173,12	110,71%	126.028.525.498,59

1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas

- ☒ Realisasi pendapatan blod puskesmas sebesar Rp9.912.132.642,25 atau mencapai 102,84% yang berarti Rp273.363.642,25 atau 2,84% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.638.769.000,00.

Realisasi pendapatan blod puskesmas tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.912.132.642,25 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blod puskesmas tahun anggaran 2019 sebesar Rp10.966.974.494,28 terdapat penurunan sebesar Rp1.054.841.852,03 atau sebesar 9,62%.

2. RSUD

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD RSUD

- ☒ Realisasi pendapatan blod RSUD sebesar Rp 105.973.809.777,18 atau mencapai 111,52% yang berarti Rp10.973.809.777,18 atau 11,52% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 95.000.000.000,00.

Realisasi pendapatan blod RSUD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 105.948.625.963,18 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blod RSUD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 92.096.175.060,81 terdapat peningkatan sebesar Rp13.877.634.716,37 atau sebesar 15,07%.

3. Badan Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan lain-lain berupa denda keterlambatan.

- ☒ Realisasi pendapatan lain-lain berupa denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar Rp97.976.884,00 dan denda pajak sebesar Rp.20.258,00 realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB dan denda pajak tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB dan denda pajak tidak dapat diprediksi perolehannya.

4. BPKAD (SKPKD)

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

- ☒ Realisasi pendapatan hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan tidak ada realisasi .

b. Pendapatan jasa giro.

- ☒ Realisasi pendapatan jasa giro per sebesar Rp1.355.620.963,85 atau mencapai 90,37% yang berarti Rp144.379.036,15 atau 9,63% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2020 sebesar Rp1.355.620.963,85 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.516.423.603,09 terdapat penurunan sebesar Rp160.802.639,24 atau sebesar 10,60%.

c. Pendapatan Bunga Deposito.

- ☒ Realisasi pendapatan bunga depositosebesar Rp9.026.027.396,74 atau 100,29% yang berarti Rp 26.027.396,74 atau 0,29% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.9.000.000.000,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.026.027.396,74 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2019 sebesar Rp18.141.780.820,88 terdapat penurunan sebesar Rp9.115.753.424,14 atau sebesar 50,25%.

d. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.

- ☒ Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKKsebesar Rp128.290.315,83 atau 128,29% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp100.000.000,00.
Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2020 sebesar Rp128.290.315,83dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2019 sebesar Rp125.232.086,26 terdapat kenaikan sebesar Rp3.058.229,57 atau 2,44%.

e. Pendapatan lain-lain.

Realisasi pendapatan lain lain terdiri dari atas

- ☒ Realisasi pendapatan lain-lain sebesar Rp1.220.393.268,95. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020. Pendapatan lain lain antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat.
- ☒ Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun anggaran 2020 sebesar Rp.40.278.790,00 Pendapatan ini merupakan pengembalian pajak dari belanja hibah untuk covid. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020.

f. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- ☒ Realisasi pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp3.782.676,00. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2020.

5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan.

- ☒ Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan sebesar Rp37.410.000,00 atau mencapai 149,64% yang berarti Rp.12.410.000,00 atau 49.64% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp25.000.000,00.

Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.410.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2019 sebesar Rp Rp25.017.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp12.393.000,00 atau sebesar 49,54%.

6. Dinas Perdagangan

- a. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

- ☒ Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp 21.387.200,00 atau mencapai 11,14% yang berarti Rp.170.612.800,00 atau 88,86% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp192.000.000,00.

Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjuantan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 21.387.200,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 83.502.300,00 terdapat penurunan sebesar Rp 62.115.100,00 atau 74,39%.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER**5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	609.712.461.000,00	632.559.647.797,00	103,75%	681.537.181.650,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan terealisasi sebesar Rp632.559.647.797,00 mencapai 103,75% yang berarti Rp22.847.186.797,00 atau 3,75% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp609.712.461.000,00. Realisasi

pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp632.559.647.797,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp681.537.181.650,00 terjadi penurunan sebesar Rp48.977.533.853,00 atau 7,19%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana pembangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.
Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.1.01	24.444.091.000,00	25.788.438.430,00	105,50%	16.076.390.385,00
Bagi hasil pajak				
4.2.1.02	19.929.376.000,00	44.866.769.518,00	225,13%	52.685.578.633,00
Bagi hasil SDA				
4.2.2.	476.135.673.000,00	473.852.439.000,00	99,52%	522.596.024.000,00
DAU				
4.2.3.	72.857.808.000,00	72.596.481.424,00	99,64%	76.239.204.819,00
DAK				
4.2.4.	16.345.513.000,00	15.455.519.425,00	94,56%	13.939.983.813,00
Bagi hasil cukai				
Total	609.712.461.000,00	632.559.647.797,00	103.75 %	681.537.181.650,00

5.1.2.1.1.Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.1.01	24.444.091.000,00	25.788.438.430,00	105,50%	16.076.390.385,00
Bagi Hasil Pajak				

Realisasi dana bagi hasil pajak adalah sebesar Rp25.788.438.430,00 atau mencapai 105,50% yang berarti Rp1.344.347.430,00 atau 5,50% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 24.444.091.000,00. Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp25.788.438.430,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2019 sebesar Rp16.076.390.385,00 terjadi peningkatan sebesar Rp9.712.048.045,00 atau 60,41%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.07/2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2020. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.01.01 PBB	3.217.096.000,00	3.215.220.537,00	99,94%	3.507.795.600,00
4.2.1.01.02 PPh Pasal 21, 25, 29	21.226.995.000,00	22.573.217.893,00	106,34%	12.568.594.785,00
Total	24.444.091.000,00	25.788.438.430,00	105,50%	16.076.390.385,00

- ☑ Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp3.215.220.537,00 atau 99,94% yang berarti Rp1.875.463,00 atau 0,06% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020.
- ☑ Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 sebesar Rp22.573.217.893,00 atau 106,34% yang berarti Rp1.346.222.893,00 atau 6,34% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020.

5.1.2.1.2.Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.02				
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	19.929.376.000,00	44.866.769.518,00	225,13%	52.685.578.633,00

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak adalah sebesar Rp44.866.769.518,00 atau 225,13% yang berarti Rp24.937.393.518,00 atau 125,13% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp19.929.376.000,00. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp52.685.578.633,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.818.809.115,00 atau 14,84%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi sumber daya alam yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan realisasi dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.07/2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2020.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.1.02.01				
Sumber daya hutan	282.743.000,00	89.390.094,00	31,62%	140.982.000,00
4.2.1.02.02				
Pungutan hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58%	590.155.800,00
4.2.1.02.04				
Pertambangan minyak & gas bumi	17.872.665.000,00	43.186.177.893,00	241,63%	51.351.710.360,00

4.2.1.02.05				
Bagi Hasil Minerba	315.387.000,00	771.296.492,00	244,56%	567.954.800,00
4.2.1.02.06				
SDA Panas Bumi	40.220.000,00	31.628.750,00	78,64%	34.775.673,00
Total	19.929.376.000,00	44.866.769.518,00	225,13%	52.685.578.633,00

- ☑ Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp 89.390.094,00 atau 31,62% yang berarti Rp193.352.906,00 atau 68,38% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 140.982.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp51.591.906,00 atau 36,89%. Pendapatan yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp788.276.289,00 atau 55,58% yang berarti Rp630.084.711,00 atau 44,42% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Realisasi ini dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp590.155.800,00 terjadi kenaikan sebesar Rp198.120.489,00 atau 33,57%. Pendapatan yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp43.186.177.893,00 atau 241,63% yang berarti Rp25.313.512.893,00 atau 141,63% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*. Realisasi bagi hasil dari pertambangan umum, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2019 sebesar Rp51.351.710.360,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.165.532.467,00 atau 8,16%.
- ☑ Realisasi Bagi Hasil Minerba sebesar Rp771.296.492,00 atau 244,56% yang berarti Rp455.909.492,00 atau 144,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang

telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp315.387.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum Royalti merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

- ☑ Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp31.628.750,00 atau 78,64% yang berarti Rp8.591.250,00 atau 21,36% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp40.220.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan bagi hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.2	476.135.673.000,00	473.852.439.000,00	99,52%	522.596.024.000,00
DAU				

Realisasi dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp473.852.439.000,00 yang mencapai 99,52% atau yang berarti Rp. 2.283.234.000,00 atau 0,48% lebih rendah dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp476.135.673.000,00 dikarenakan ada perubahan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid -19). Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp473.852.439.000,00 dibandingkan dengan realisasi DAU tahun anggaran 2019 sebesar Rp522.596.024.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp48.743.585.000,00 atau 9,33%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrollable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima.

5.1.2.1.4.Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.3.				
DAK	72.857.808.000,00	72.596.481.424,00	99,64%	76.239.204.819,00

Realisasi dana alokasi khusus adalah sebesar Rp72.596.481.424,00 yang berarti 99,64% yang berarti Rp261.326.576,00 atau 0,36% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp72.857.808.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp76.239.204.819,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.642.723.395,00 atau 4,78%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid -19). Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.3
Dana Alokasi Khusus

4.2.3 DAK	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Reguler :				
Pendidikan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jalan	0,00	0,00	0,00%	8.953.419.000,00
Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	4.467.310.349,00
Air minum	0,00	0,00	0,00%	0,00
Sanitasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Lingkungan hidup	0,00	0,00	0,00%	0,00
Keluarga berencana	736.900.000,00	227.800.400,00	30,91%	0,00
Transportasi darat	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kelautan & perikanan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pertanian	0,00	0,00	0,00%	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Rujukan	2.507.656.000,00	2.233.783.318,00	89,08%	0,00
Pelayanan Kesehatan Dasar	1.084.937.000,00	1.038.522.550,00	95,72%	0,00
Kedaulatan pangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Non Reguler :				
DAK Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00%	0,00
DAK Pengendalian Penyakit	2.058.533.000,00	1.938.909.900,00	94,19%	0,00
Non Fisik :				
BO P PAUD	4.306.200.000,00	3.930.092.890,00	91,27%	3.948.600.000,00
TPG	53.974.947.000,00	53.974.947.000,00	100%	54.369.533.120,00
Tunj.peng.guru	56.750.000,00	128.750.000,00	226,87%	142.850.000,00
TPG Non Profesi	0,00.	0,00	0,00%	0,00
BOP Kesehatan	4.968.224.000,00	6.500.725.343,00	130,85%	2.678.626.700,00
Pengawasan Obat & Makanan	247.615.000,00	0,00	0,00%	0,00
BOP KB	940.904.000,00	665.356.623,00	70,71%	336.437.450,00
Kependudukan	831.532.000,00	814.083.400,00	97,90%	786.728.200,00
Bantuan OPS	652.600.000,00	652.500.000,00	49,98%	555.700.000,00
UKM	491.010.000,00	491.010.000,00	100%	0,00
Total	72.857.808.000,00	72.596.481.424,00	99,64%	76.239.204.819,00

5.1.2.1.5.Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.4.				
Bagi hasil cukai	16.345.513.000,00	15.455.519.425,00	94,56%	13.939.983.813,00

Realisasi dana bagi hasil cukai adalah sebesar Rp15.445.519.425,00 atau mencapai 94,56% yang berarti Rp.889.993.575,00 atau lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.345.513.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp15.445.519.425,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai pada tahun anggaran 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp1.515.535.612,00 atau 10,87%.

Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan

pagu anggaran. Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.07/2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2020.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	73.313.029.000,00	73.313.029.000,00	100%	55.542.726.000,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya adalah sebesar Rp.73.313.029.000,00 yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.73.313.029.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 karena penanganan pandemi corona (covid -19).

Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

5.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.4.01 Dana penyesuaian	73.313.029.000,00	73.313.029.000,00	100%	55.542.726.000,00

Realisasi pendapatan dana penyesuaian adalah sebesar Rp73.313.029.000,00 mencapai 100% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.313.029.000,00. Realisasi Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan dana penyesuaian tahun anggaran 2020 sebesar Rp73.313.029.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp55.542.726.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp17.770.303.000,00 atau 31,09%.

5.1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	65.383.693.000,00	85.066.731.855,00	130,10%	86.049.555.933,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi - dana perimbangan terealisasi sebesar Rp85.066.731.855,00 mencapai 130,10% yang berarti Rp19.683.038.855,00 atau 30,10% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp65.383.693.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp85.066.731.855,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2019 sebesar Rp86.049.555.933,00 terjadi penurunan sebesar Rp982.824.078,00 atau 0,98% Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi dana perimbangan sesuai dengan Keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/495/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/kota berdasarkan realisasi penerimaan kas tahun tahun anggaran 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/254/KPTS/013/2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Bagi hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I tahun anggaran 2020.

5.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.3				
	64.366.614.000,00	84.049.652.855,00	130,58%	84.934.976.933,00
Dana bagi hasil pajak provinsi				

Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi adalah sebesar Rp84.049.652.855,00 mencapai 130,58% yang berarti Rp19.683.038.855,00 atau 30,58% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp64.366.614.000,00. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi hasil pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp84.049.652.855,00 dibandingkan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp84.934.976.933,00. atau terjadi penurunan sebesar Rp885.324.078,00 atau 1,04%.

Perincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.1
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. 4.3.3.01.01 PKB	16.600.776.000,00	27.263.977.323,00	164,23%	27.502.812.146,00
2. 4.3.3.01.02 BBNKB	8.188.188.000,00	12.318.198.181,00	150,44%	12.671.773.186,00
3. 4.3.3.01.03 PBBKB	15.745.593.000,00	14.408.023.859,00	91,51%	22.404.927.429,00
4. 4.3.3.01.04 Air Permukaan	163.486.000,00	200.953.509,00	122,92%	250.651.372,00
5. 4.3.3.01.05 Pajak Rokok	23.668.571.000,00	29.858.499.983,00	126,15%	22.104.812.800,00
Total	64.366.614.000,00	84.049.652.855,00	130,58%	84.934.976.933,00

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp27.263.977.323,00 atau mencapai 164,23% yang berarti Rp10.663.201.323,00 atau 64,23% lebih tinggi dibandingkan dengan

target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.600.776.000,00.

Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2020 sebesar Rp27.263.977.323,00 dibandingkan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2019 sebesar Rp27.502.812.146,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp238.834.823,00 atau 0,87%.

2. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp12.318.198.181,00 atau mencapai 150,44% yang berarti Rp4.130.010.181,00 atau 50,44% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp8.188.188.000,00.

Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.318.198.181,00 dibandingkan dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun 2019 sebesar Rp12.671.773.186,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp353.575.005,00 atau 2,79%.

3. Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp14.408.023.859,00 atau mencapai 91,51% yang berarti Rp1.337.569.141,00 atau 8,49% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp15.745.593.000,00.

Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.408.023.859,00 dibandingkan dengan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar Rp22.404.927.429,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp7.996.903.570,00 atau 35,69%.

4. Realisasi pajak air permukaan sebesar Rp200.953.509,00 atau mencapai 122,92% yang berarti Rp37.467.509,00 atau 22,92% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp163.486.000,00.

Realisasi pajak air pemanfaatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp200.953.509,00 dibandingkan dengan realisasi pajak pemanfaatan air tahun 2019 sebesar Rp250.651.372,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp49.697.863,00 atau 80,17%.

5. Realisasi pajak rokok sebesar Rp29.858.499.983,00 atau mencapai 126,15% yang berarti Rp6.189.928.983,00 atau 26,15% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp23.668.571.000,00.

Realisasi pajak rokok per 31Desember tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.858.499.983,00 dibandingkan dengan realisasi pajak rokok tahun 2019 sebesar Rp22.104.812.800,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp7.753.687.183,00 atau 35,08%

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	1.017.079.000,00	1.017.079. 000,00	100%	1.114.579. 000,00

Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp1.017.079.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.017.079.000,00. Realisasi bantuan keuangan dari provinsi per 31desember tahun aggaran 2020 sebesar Rp1.017.079.000,00 dibandingkan dengan realiasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.114.579.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp97.500.000,00 atau 8,75% Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 14 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 .

Perincian anggaran dan realisasi bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.2
Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyelenggaraan pendidikan madraah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	476.850.000,00	100%	476.850.000,00
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Puskesmas Rawat Inap standart	0,00	0,00	0%	30.000.000,00
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	100%	163.200.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	72.000.000,00
BOP Madin	75.000.000,00	75.000.000,00	100%	75.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100%	50.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	48.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	12.000.000,00	12.000.000,00	100%	12.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	55.000.000,00	100%	55.000.000,00
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	121.029.000,00	121.029.000,00	100%	121.029.000,00
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	1.500.000,00
Total	1.017.079.000,00	1.017.079.000,00	100%	1.114.579.000,00

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3				
Lain-lain pendapatan yang sah	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp.20.029.980.000,00 atau mencapai 103% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.399.600.000,00. Realisasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.029.980.000,00 dibandingkan dengan realisasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.189.280.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp840.700.000,00 atau 4,38%. Realisasi lain-lain pendapatan yang ini merupakan merupakan pendapatan yang *uncontrolable*.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.1				
Pendapatan hibah	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00
Total	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.1				
Pendapatan Dana Hibah Dana Bos	19.399.600.000,00	20.029.980.000,00	103,25%	19.189.280.000,00

Penerimaan dari pendapatan dana hibah dana BOS terealisasi sebesar Rp.20.029.980.000,00 atau mencapai 112,68% yang berarti Rp.630.380.000,00 lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.399.600.000,00. Realisasi pendapatan dana hibah dana sebesar Rp 20.029.980.000,00 dibandingkan dengan realiasi pendapatan dana hibah dana bos tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.189.280.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp840.700.000,00 atau 4,38%.

5.2. BELANJA

5.2.1. BELANJA OPERASI

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	508.839.805.584,56	441.740.830.119,00	86,81%	440.222.361.775,00

Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2020 sebesar Rp441.740.830.119,00 atau 86,81% yang berarti Rp67.098.975.465,56 atau 15,19% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp508.839.805.584,56,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp1.518.468.344,00 atau sebesar 0,34 %.

Perincian obyek belanja anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.1.1
Belanja Pegawai
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
BELANJA PEGAWAI	508.839.805.584,56	441.740.830.119,00	86,81%	440.222.361.775,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung	428.985.359.891,56	371.359.200.247,00	86,57%	375.303.304.387,00
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	260.227.047.549,00	221.623.558.333,00	85,17%	225.712.878.659,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS	92.771.688.814,00	82.277.750.079,00	88,69%	74.356.579.377,00
Tambahan Penghasilan PNS BLUD	9.350.708.000,00	7.200.702.042,00	77,01%	6.771.930.294,00
5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH	4.701.600.000,00	4.545.272.900,00	96,68%	4.454.496.650,00
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.840.503.528,00	3.817.429.733,00	99,40%	3.992.809.987,00
5.1.1.07 Tunjangan Profesi Guru	58.093.812.000,00	51.894.487.160,00	89,33%	60.014.609.420,00
Belanja Pegawai Langsung	79.854.445.693,00	70.381.629.872,00	88,14%	64.919.057.338,00

5.2.1.01 Honorarium PNS	53.013.650.481,00	45.165.275.724,00	85,20%	40.433.695.030,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS	8.823.435.000,00	8.418.735.000,00	95,41%	8.394.345.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur	4.363.116.762,00	3.739.990.036,00	85,72%	4.233.107.325,00
5.2.1.05 Belanja Pegawai BLUD	11.068.945.400,00	10.792.245.862,00	97,50%	9.528.675.000,00
5.2.1.06 Belanja Pegawai BOS	2.585.298.050,00	2.265.383.250,00	87,63%	2.329.235.033,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.1
Belanja Pegawai Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 =(3/2)	5
Dinas Pendidikan	190.096.592.738,00	174,792,378,157.00	91.95%	190.598.262.380,00
Dinas Kesehatan KB	39.811.396.840,00	37,008,693,188.00	92.96%	34.902.936.663,00
RSUD	31.301.626.854,00	28,400,006,313.00	90.73%	26.891.041.812,00
Dinas PU TR	9.644.952.463,00	8,744,217,456.00	90.66%	10.252.671.794,00
Dinas Perkim	5.945.800.100,00	5,633,900,438.00	94.75%	5.265.542.820,00
Satpol PP	8.832.021.925,00	8,151,783,648.00	92.30%	7.039.951.936,00
BPBD	1.424.251.964,00	1,367,637,708.00	96.02%	1.174.721.906,00
Dinas Sosial	6.369.241.533,00	4,526,201,295.00	71.06%	4.661.065.597,00
Dinas Tenaga Kerja	4.099.336.970,00	3,800,017,709.00	92.70%	3.448.385.833,00
Dinas LH	13.551.642.314,00	12,858,999,568.00	94.89%	12.669.999.211,00
Dispendukcapil	4.402.506.280,00	3,816,623,191.00	86.69%	4.045.559.954,00
Dinas Perhubungan	9.227.661.108,00	8,192,811,571.00	88.79%	7.593.403.732,00
Dinas Infokom	5.392.147.988,00	4,580,348,886.00	84.94%	4.910.728.226,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	4.480.437.270,00	4,090,955,679.00	91.31%	4.162.051.362,00
Dinas Budparpora	4.790.625.568,00	4,178,015,160.00	87.21%	3.347.198.454,00
Dinas Perpustakaan	3.534.824.270,00	3,303,713,338.00	93.46%	2.593.258.260,00
Walikota/Wakil/(Bagian Umum	802.579.300,00	705,267,744.00	87.88%	629.404.684,00

Belanja Pegawai Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Bagian Pemerintahan	840.078.500,00	721,264,144.00	85.86%	894.705.554,00
Bagian Organisasi	841.214.220,00	780,725,486.00	92.81%	659.866.155,00
Bagian Umum	12.738.606.470,00	11,520,395,723.00	90.44%	12.362.238.497,00
Bagian Hukum	1.663.546.320,00	1,541,652,743.00	92.67%	817.869.796,00
Bagian Perekkesra	972.787.120,00	889,257,083.00	91.41%	707.565.503,00
Bagian Adbang	1.612.659.320,00	1,230,156,802.00	76.28%	1.579.669.572,00
Sekretariat DPRD	15.992.463.064,00	14,964,304,663.00	93.57%	15.084.343.422,00
BKD	5.585.895.085,00	5,108,831,947.00	91.46%	5.125.067.843,00
BPKAD	47.452.631.525,56	18,945,617,600.00	39.93%	13.277.159.465,00
Bependa	8.441.898.000,00	7,748,998,522.00	91.79%	8.222.472.358,00
Inspektorat	6.476.229.800,00	6,426,127,009.00	99.23%	4.873.610.991,00
BAPPEDA	6.806.303.870,00	5,762,592,782.00	84.67%	4.991.143.746,00
Kec Kartoharjo	11.872.143.370,00	11,133,506,105.00	93.78%	9.395.694.869,00
Kec Manguharjo	12.332.495.090,00	11,782,442,267.00	95.54%	9.606.829.953,00
Kec Taman	12.192.679.300,00	11,456,627,254.00	93.96%	10.740.745.115,00
Bakesbangpol	3.990.198.275,00	3,631,686,789.00	91.02%	3.238.532.219,00
Dinas Pertanian KP	5.367.006.360,00	5,021,091,735.00	93.55%	5.023.791.156,00
Dinas Perdagangan	9.953.324.410,00	8,923,980,416.00	89.66%	9.434.870.937,00
Total	508.839.805.584,56	441,740,830,119.00	86,81%	440.222.361.775,00

5.2.1.1.1 Belanja Pegawai Tidak Langsung (BTL)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai BTL	428.985.359.891,56	371.359.200.247,00	86,57%	375.303.304.387,00

Realisasi belanja pegawai tidak langsung Per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.359.200.247,00 atau 86,57% yang berarti Rp57.626.159.644,56 atau 15,52% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp428.985.359.891,56. Realisasi belanja

pegawai tidak langsung Per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.359.200.247,00 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp375.303.304.387,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.944.104.140,00 atau sebesar 1,06%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.1
Belanja Pegawai Tidak Langsung Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai BTL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	180.562.269.100,00	166,928,450,288.00	92.45%	181.739.167.319,00
Dinas Kesehatan KB	28.639.155.600,00	27,620,735,225.00	96.44%	26.786.820.062,00
RSUD	21.224.196.854,00	18,581,753,813.00	87.55%	18.091.001.812,00
Dinas PU TR	6.429.858.400,00	6,000,799,187.00	93.33%	6.757.047.780,00
Dinas Perkim	4.376.493.900,00	4,196,910,952.00	95.90%	3.977.391.721,00
Dinas Satpol PP	4.733.251.475,00	4,596,947,153.00	97.12%	3.903.725.038,00
BPBD	1.120.444.964,00	1,076,734,709.00	96.10%	933.623.301,00
Dinas Sosial	4.924.785.973,00	3,255,088,481.00	66.10%	3.395.295.024,00
Dinas Tenaga Kerja	3.095.955.650,00	2,938,570,520.00	94.92%	2.626.764.922,00
Dinas LH	10.510.039.944,00	10,054,790,625.00	95.67%	10.223.570.302,00
Dispendukcapil	3.420.562.000,00	2,977,977,157.00	87.06%	3.163.683.946,00
Dinas Perhubungan	6.080.956.028,00	5,416,467,650.00	89.07%	5.066.708.163,00
Dinas Infokom	3.993.960.000,00	3,372,570,050.00	84.44%	3.745.371.661,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	3.429.702.000,00	3,099,828,993.00	90.38%	3.166.902.864,00
Dinas Budparpora	3.132.991.248,00	2,670,121,681.00	85.23%	2.516.182.211,00
Dinas Perpustakaan	2.697.892.150,00	2,557,339,613.00	94.79%	2.088.357.987,00
Walikota/Wakil(Bagian Umum)	802.579.300,00	705,267,744.00	87.88%	629.404.684,00
Bagian Pemerintahan	486.370.000,00	427,965,313.00	87.99%	460.354.110,00
Bagian Organisasi	485.567.500,00	456,221,826.00	93.96%	389.533.694,00
Bagian Umum	9.469.998.750,00	8,725,911,972.00	92.14%	9.393.763.274,00
Bagian Hukum	1.114.730.000,00	1,016,399,520.00	91.18%	454.605.771,00

Belanja Pegawai BTL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagian Perekkesra	568.775.000,00	546,115,815.00	96.02%	445.001.266,00
Bagian Adbang	1.146.448.500,00	837,142,219.00	73.02%	1.145.681.920,00
Sekretariat DPRD	15.010.803.050,00	14,183,202,117.00	94.49%	14.328.434.142,00
BKD	4.033.814.400,00	3,738,470,067.00	92.68%	3.890.320.610,00
BPKAD	45.946.705.805,56	17,843,101,368.00	38.83%	12.337.614.854,00
Bependa	8.293.708.000,00	7,603,443,522.00	91.68%	8.068.302.358,00
Inspektorat	4.723.068.800,00	4,725,855,650.00	100.06%	3.553.274.630,00
BAPPEDA	5.472.256.750,00	4,525,437,096.00	82.70%	3.853.818.315,00
Kec Kartoharjo	9.212.990.450,00	8,709,455,036.00	94.53%	7.587.014.484,00
Kec Manguharjo	9.490.244.550,00	9,284,345,202.00	97.83%	7.870.436.000,00
Kec Taman	9.395.622.500,00	8,893,390,558.00	94.65%	8.424.220.416,00
Bakesbangpol	3.023.534.500,00	2,885,714,480.00	95.44%	2.631.302.205,00
Dinas Pertanian KP	4.075.432.700,00	3,777,454,123.00	92.69%	3.883.476.307,00
Dinas Perdagangan	7.860.194.050,00	7,129,220,522.00	90.70%	7.775.131.234,00
Total	428.985.359.891,56	371,359,200,247.00	86.57%	375.303.304.387,00

5.2.1.1.2 Belanja Pegawai Langsung (BL)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai BL	79.854.445.693,00	70.381.629.872,00	88,14%	64.919.057.388,00

Realisasi belanja pegawai langsung per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.381.629.872,00 atau 88,14% yang berarti Rp9.472.815.821,00 atau 13,46% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp79.854.445.693,00. Realisasi belanja pegawai langsung Per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.381.629.872,00 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp64.919.057.388,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.462.572.484,00 atau sebesar 7,76%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.2
Belanja Pegawai Langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai BL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	9.534.323.638,00	7,863,927,869.00	82.48%	8.859.095.061,00
Dinas Kesehatan KB	11.172.241.240,00	9,387,957,963.00	84.03%	8.116.116.601,00
RSUD	10.077.430.000	9,818,252,500.00	97.43%	8.800.040.000,00
Dinas PU TR	3.215.094.063,00	2,743,418,269.00	85.33%	3.495.624.014,00
Dinas Perkim	1.569.306.200,00	1,436,989,486.00	91.57%	1.288.151.099,00
Dinas Satpol PP	4.098.770.450,00	3,554,836,495.00	86.73%	3.136.226.898,00
BPBD	303.807.000,00	290,902,999.00	95.75%	241.098.605,00
Dinas Sosial	1.444.455.560,00	1,271,112,814.00	88.00%	1.265.770.573,00
Dinas Tenaga Kerja	1.003.381.320,00	861,447,189.00	85.85%	821.620.911,00
Dinas LH	3.041.602.370,00	2,804,208,943.00	92.20%	2.446.428.909,00
Dispendukcapil	981.944.280,00	838,646,034.00	85.41%	881.876.008,00
Dinas Perhubungan	3.146.705.080,00	2,776,343,921.00	88.23%	2.526.695.569,00
Dinas Infokom	1.398.187.988,00	1,207,778,836.00	86.38%	1.165.356.565,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	1.050.735.270,00	991,126,686.00	94.33%	995.148.498,00
Dinas Budparpora	1.657.634.320,00	1,507,893,479.00	90.97%	831.016.243,00
Dinas Perpustakaan	836.932.120,00	746,373,725.00	89.18%	504.900.273,00
Bagian Pemerintahan	353.708.500,00	293,298,831.00	82.92%	434.351.444,00
Bagian Organisasi	355.646.720,00	324,503,660.00	91.24%	270.332.461,00
Bagian Umum	3.268.607.720,00	2,794,483,751.00	85.49%	2.968.475.223,00
Bagian Hukum	548.816.320,00	525,253,223.00	95.71%	363.264.025,00
Bagian Perekkesra	404.012.120,00	343,141,268.00	84.93%	262.564.237,00
Bagian Adbang	466.210.820,00	393,014,583.00	84.30%	433.987.652,00

Belanja Pegawai BL Per OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Sekretariat DPRD	981.660.014,00	781,102,546.00	79.57%	755.909.280,00
BKD	1.552.080.685,00	1,370,361,880.00	88.29%	1.234.747.233,00
BPKAD	1.505.925.720,00	1,102,516,232.00	73.21%	939.544.611,00
Bependa	148.190.000,00	145,555,000.00	98.22%	154.170.000,00
Inspektorat	1.753.161.000,00	1,700,271,359.00	96.98%	1.320.336.361,00
BAPPEDA	1.334.047.120,00	1,237,155,686.00	92.74%	1.137.325.431,00
Kec Kartoharjo	2.659.152.920,00	2,424,051,069.00	91.16%	1.808.680.385,00
Kec Manguharjo	2.842.250.540,00	2,498,097,065.00	87.89%	1.736.393.953,00
Kec Taman	2.797.056.800,00	2,563,236,696.00	91.64%	2.316.524.699,00
Bakesbangpol	966.663.775,00	745,972,309.00	77.17%	607.230.014,00
Dinas Pertanian KP	1.291.573.660,00	1,243,637,612.00	96.29%	1.140.314.849,00
Dinas Perdagangan	2.093.130.360,00	1,794,759,894.00	85.75%	1.659.739.703,00
Total	79.854.445.693,00	70,381,629,872.00	88.14%	64.919.057.388,00

5.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Barang Jasa	379.571.611.527,00	350.024.036.581,10	92,22%	369.278.712.052,86

Realisasi belanja barang jasa Per 31 Desember 2020 sebesar Rp350.024.036.581,10 atau 92,22% yang berarti Rp29.547.574.945,90 atau 7,78% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp379.571.611.527,00. Selain itu juga dilakukan reklas atas alokasi anggaran yang terkait dengan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta terkait pembangunan lapak pedagang di 3 Kecamatan yang didistribusikan menjadi asset tetap.

Perincian anggaran dan realisasi obyek belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebelum dilakukan reklas tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Barang dan Jasa	379.571.611.527,00	350.024.036.581,10	92,22%	369.278.712.052,86
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	23.966.777.859,00	20.073.063.974,20	83,75%	19.937.173.455,00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material	11.987.009.226,00	10.519.865.275,00	87,76%	6.148.942.644,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	112.716.092.691,00	106.400.462.468,00	94,40%	92.731.559.090,22
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi	973.466.108,00	531.407.492,00	54,59%	3.025.083.052,26
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.619.398.470,00	6.235.084.582,00	81,83%	6.217.236.004,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	9.644.092.733,00	8.831.628.321,00	91,58%	16.180.867.596,50
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	1.267.163.160,00	861.995.700,00	68,03%	2.873.502.980,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	521.322.850,00	279.105.000,00	53,54%	1.546.659.445,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.058.487.500,00	1.283.118.380,00	62,33%	5.351.005.462,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	24.673.169.008,00	21.313.929.710,00	86,39%	30.167.721.294,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	914.832.250,00	845.440.900,00	92,41%	1.079.377.963,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja	462.226.000,00	456.891.900,00	98,85%	326.087.678,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.408.186.983,00	5.032.377.282,00	93,05%	4.956.881.212,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	29.873.243.524,00	23.974.388.194,00	80,25%	40.205.255.910,00
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	00,00%	48.000.000,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.081.336.000,00	851.170.000,00	78,71%	2.655.555.800,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan	20.115.355.533,00	19.383.968.120,15	96,36%	22.696.464.521,54
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi	7.358.218.370,00	6.512.191.250,00	88,50%	5.843.835.523,00
5.2.2.22 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	23.964.447.185,00	22.648.150.123,21	94,51%	3.344.642.204,00
5.2.2.24 Belanja Software / Aplikasi Komputer	0,00	0,00	00,00%	98.060.000,00

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.282.970.150,00	79.739.512.222,00	100,58%	87.983.714.667,15
5.2.2.27 Belanja uang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	425.453.000,00	286.200.000,00	67,27%	3.197.060.000,00
5.2.2.28 Belanja Barang dan Jasa BOS	15.258.362.427,00	13.964.085.687,54	91,52%	12.664.025.551,19

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Kartoharjo	193,239,995.00	188,974,900.00	97.79%	175.994.405,42
SDN 02 Kartoharjo	34,122,925.00	31,421,925.00	92.08%	35.574.871,17
SDN 03 Kartoharjo	42,635,599.00	40,188,400.00	94.26%	40.325.394,85
SDN 01 Klegen	183,698,164.00	183,060,000.00	99.65%	175.618.670,37
SDN 02 Klegen	79,255,092.00	76,938,384.00	97.08%	64.277.804,75
SDN 03 Klegen	172,578,671.00	172,245,981.00	99.81%	157.555.364,42
SDN 04 Klegen	43,418,735.00	41,018,490.00	94.47%	49.648.217,02
SDN Oro Oro Ombo	150,791,500.00	147,442,400.00	97.78%	121.018.337,68
SDN 01 Rejomulyo	52,872,955.00	51,852,955.00	98.07%	45.236.731,54
SDN 02 Rejomulyo	28,018,784.00	27,649,900.00	98.68%	27.367.791,17
SDN 01 Kanigoro	50,171,657.00	48,990,500.00	97.65%	65.124.033,60
SDN 02 Kanigoro	82,441,856.00	78,765,000.00	95.54%	69.267.733,10
SDN 03 Kanigoro	57,246,251.00	53,216,251.13	92.96%	80.960.391,18
SDN Sukosari	15,057,140.00	15,056,180.00	99.99%	9.911.541,28
SDN Pilangbango	122,560,321.00	117,035,576.00	95.49%	110.078.249,28
SDN 01 Tawangrejo	95,901,312.00	95,901,312.00	100.00%	93.577.493,71

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 02 Tawangrejo	48,543,819.00	48,511,819.00	99.93%	50.875.438,49
SDN Kelun	93,963,915.00	93,693,915.12	99.71%	82.497.541,93
SDN 01 Manguharjo	228,198,616.00	220,202,200.00	96.50%	183.658.375,95
SDN 01 Nambangan Lor	170,083,461.00	161,656,530.00	95.05%	159.853.825,32
SDN 02 Nambangan Lor	67,855,616.00	65,974,350.00	97.23%	77.556.233,78
SDN 01 Madiun Lor	84,845,843.00	81,114,220.00	95.60%	74.481.090,80
SDN 02 Madiun Lor	90,978,832.00	83,958,200.00	92.28%	80.614.555,45
SDN 03 Madiun Lor	266,584,900.00	256,533,025.00	96.23%	212.777.904,49
SDN 04 Madiun Lor	204,017,104.00	201,606,470.00	98.82%	198.358.190,06
SDN 05 Madiun Lor	243,212,888.00	240,791,497.00	99.00%	215.729.506,34
SDN 01 Nambangan Kidul	74,395,000.00	71,545,000.00	96.17%	70.017.561,34
SDN 02 Nambangan Kidul	55,389,948.00	55,389,948.00	100.00%	56.936.987,22
SDN 03 Nambangan Kidul	198,990,000.00	198,989,668.00	100.00%	160.646.740,27
SDN 04 Nambangan Kidul	85,704,663.00	82,651,400.00	96.44%	71.407.022,05
SDN 01 Winongo	190,681,404.00	190,681,370.00	100.00%	154.475.941,43
SDN 02 Winongo	53,404,314.00	50,403,900.00	94.38%	34.678.603,52
SDN Ngegong	123,728,700.00	120,884,625.00	97.70%	82.355.188,79
SDN Patihan	214,049,251.00	191,097,250.00	89.28%	197.116.191,26
SDN 01 Pangongangan	35,611,011.00	33,200,600.00	93.23%	33.450.673,98
SDN 02 Pangongangan	142,876,287.00	137,748,987.00	96.41%	145.029.903,12
SDN Sogaten	90,956,808.00	90,297,954.00	99.28%	77.001.302,62
SDN 01 Taman	282,307,000.00	282,227,456.00	99.97%	223.144.747,00
SDN 02 Taman	52,277,613.00	49,844,709.77	95.35%	43.814.565,23
SDN 03 Taman	52,915,395.00	49,800,800.00	94.11%	58.638.100,75
SDN 01 Pandean	171,187,093.00	160,999,790.00	94.05%	160.703.698,76
SDN 02 Pandean	160,720,352.00	132,257,500.00	82.29%	170.014.392,89
SDN Banjarejo	271,535,250.00	264,809,562.00	97.52%	220.150.429,35
SDN 01 Mojorejo	53,563,000.00	48,113,185.19	89.83%	45.043.881,71
SDN 02 Mojorejo	289,015,874.00	283,401,893.00	98.06%	226.146.808,74

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Manisrejo	187,228,933.00	180,795,450.00	96.56%	136.941.343,63
SDN 02 Manisrejo	129,609,900.00	129,506,475.00	99.92%	130.131.796,95
SDN 03 Manisrejo	95,711,437.00	91,734,650.00	95.85%	86.264.337,97
SDN 04 Manisrejo	117,314,189.00	114,594,050.00	97.68%	101.257.898,23
SDN 01 Demangan	100,561,641.00	95,969,400.00	95.43%	71.553.920,77
SDN 02 Demangan	103,247,665.00	102,871,800.00	99.64%	95.706.019,41
SDN 01 Josenan	109,541,076.00	106,986,478.00	97.67%	94.826.691,83
SDN 02 Josenan	86,974,287.00	86,803,390.00	99.80%	88.740.332,91
SDN 03 Josenan	51,110,738.00	48,007,039.00	93.93%	37.312.575,63
SDN Kejuron	37,026,037.00	34,915,900.00	94.30%	5.025.328,44
SDN Kuncen	26,008,359.00	25,198,600.00	96.89%	35.380.897,27
SMP NEGERI 1	990,974,875.00	937,274,886.00	94.58%	649.709.388,08
SMP NEGERI 2	680,446,009.00	377,337,077.00	55.45%	543.747.694,28
SMP NEGERI 3	470,753,881.00	453,407,000.00	96.32%	496.044.531,24
SMP NEGERI 4	823,716,802.00	709,034,940.00	86.08%	682.006.580,78
SMP NEGERI 5	389,844,096.00	327,621,254.00	84.04%	366.796.834,08
SMP NEGERI 6	602,831,518.00	569,564,517.87	94.48%	475.957.762,43
SMP NEGERI 7	784,146,332.00	722,257,854.00	92.11%	535.371.966,92
SMP NEGERI 8	478,478,287.00	468,244,587.46	97.86%	427.748.196,98
SMP NEGERI 9	611,386,505.00	530,522,700.00	86.77%	284.933.515,33
SMP NEGERI 10	532,087,324.00	520,491,201.00	97.82%	489.672.992,65
SMP NEGERI 11	660,105,499.00	654,623,000.00	99.17%	556.645.767,13
SMP NEGERI 12	670,632,804.00	603,910,577.00	90.05%	588.938.932,75
SMP NEGERI 13	652,713,247.00	412,270,933.00	63.16%	532.834.339,44
SMP NEGERI 14	364,306,072.00	341,995,950.00	93.88%	261.763.472,88
Total	14,072,813,103.00	12,807,264,421.41	91.01%	12.664.025.551,19

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.2
Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan
 untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
PUSKESMAS TAWANGREJO			
Belanja Barang dan Jasa	1,309,562,000.00	1,079,841,966.00	82.46%
Belanja Persediaan	802,531,200.00	614,667,523.00	76.59%
Belanja Alat Tulis Kantor	31,674,600.00	31,601,100.00	99.77%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12,234,050.00	11,150,000.00	91.14%
Belanja Materai dan Benda Pos	1,950,000.00	689,500.00	35.36%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	44,324,640.00	43,094,474.00	97.22%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20,691,000.00	17,859,805.00	86.32%
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	47,639,800.00	46,361,695.00	97.32%
Belanja Cetak	38,481,000.00	32,647,181.00	84.84%
Belanja Penggandaan	7,158,000.00	5,401,500.00	75.46%
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	348,700,000.00	254,705,500.00	73.04%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,595,000.00	5,103,000.00	44.01%
Belanja makanan dan Minuman Tamu	4,500,000.00	280,500.00	6.23%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	46,488,000.00	17,650,000.00	37.97%
Belanja Perbekalan Kesehatan Pakai Habis/Obat	149,745,110.00	110,973,268.00	74.11%
Belanja Kegiatan senam Prolanis	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00%
Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	13,800,000.00	11,200,000.00	81.16%
Belanja Rompi Penanganan Covid 19	21,600,000.00	24,000,000.00	111.11%
Belanja Jasa	371,590,000.00	354,729,091.00	95.46%
Belanja Jasa kantor	116,400,000.00	108,393,013.00	93.12%
Belanja telepon	12,000,000.00	11,707,666.00	97.56%
Belanja air	9,600,000.00	7,282,320.00	75.86%
Belanja listrik	90,000,000.00	86,823,027.00	96.47%
Belanja surat kabar	3,600,000.00	1,800,000.00	50.00%
Belanja TV kabel	1,200,000.00	780,000.00	65.00%
Belanja Kerjasama Pihak Ketiga	14,880,000.00	9,764,078.00	65.62%
Pembakaran limbah dan pengangkutan abu	11,880,000.00	7,857,578.00	66.14%
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2,000,000.00	1,906,500.00	95.33%
Pengisian APAR	1,000,000.00	-	0.00%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	102,110,000.00	100,810,000.00	98.73%
Upah Tenaga Penjaga dan Kebersihan Puskesmas Induk	48,750,000.00	48,750,000.00	100.00%
Upah Petugas parkir Puskesmas Induk	9,100,000.00	9,100,000.00	100.00%
Upah Tenaga Penjaga dan Kebersihan Puskesmas Pembantu	31,200,000.00	31,200,000.00	100.00%
Upah Tenaga Cuci Puskesmas	9,860,000.00	9,860,000.00	100.00%
Upah Instruktur Senam Prolanis	600,000.00	600,000.00	100.00%
Upah Instruktur Senam Jumat Sehat	2,000,000.00	700,000.00	35.00%
Upah Pengangkut Sampah	600,000.00	600,000.00	100.00%
Belanja Jasa Pelayanan Non PNS :	125,700,000.00	123,850,000.00	98.53%
Dokter PTT	15,000,000.00	13,750,000.00	91.67%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Tenaga Kontrak BLUD Analis Keuangan	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD perawat	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD bidan	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD asisten apoteker	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD rekam medis	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak Kegiatan Promosi Kesehatan	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
Tenaga Kontrak BLUD Administrator Kesehatan	7,200,000.00	6,600,000.00	91.67%
Tenaga Kontrak Pemkot Pengemudi	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
Dokter Internship	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%
Belanja Uang Overtime Tenaga Upahan hari Libur	12,000,000.00	11,800,000.00	98.33%
Belanja Perijinan Puskesmas	500,000.00	112,000.00	22.40%
Belanja Pemeliharaan :	107,250,800.00	91,056,805.00	84.90%
Belanja Pemeliharaan Gedung	60,232,700.00	53,656,000.00	89.08%
Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	22,018,100.00	17,791,705.00	80.80%
Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000.00	4,499,500.00	89.99%
Belanja Pemeliharaan Printer	4,500,000.00	2,548,000.00	56.62%
Belanja Pemeliharaan AC	5,000,000.00	4,115,200.00	82.30%
Belanja Pemeliharaan Genset	6,000,000.00	5,655,000.00	94.25%
Belanja Sarana Prasarana	4,500,000.00	2,791,400.00	62.03%
Belanja Perjalanan Dinas	28,190,000.00	19,388,547.00	68.78%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (Surabaya)	10,440,000.00	4,620,000.00	44.25%
Belanja Perjalanan Dinas Rujukan Luar daerah	2,750,000.00	0,00	0.00%
Belanja Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pegawai	15,000,000.00	14,768,547.00	98.46%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,309,562,000.00	1,079,841,966.00	82.46%
PUSKESMAS BANJAREJO			
Belanja Persediaan	1,150,387,450.00	1,047,002,138.00	91.01%
Belanja Alat Tulis Kantor	68,641,900.00	68,641,000.00	100.00%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	17,618,250.00	17,618,000.00	100.00%
Belanja Materai dan Benda Pos	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	63,060,650.00	68,991,000.00	109.40%
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	14,661,250.00	17,664,082.00	120.48%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,691,900.00	3,616,109.00	97.95%
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	334,825,500.00	336,916,317.00	100.62%
Belanja Cetak	79,678,000.00	42,092,740.00	52.83%
Belanja Penggandaan	7,500,000.00	7,724,350.00	102.99%
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	468,825,000.00	399,715,840.00	85.26%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,125,000.00	31,499,500.00	112.00%
Belanja makanan dan Minuman Tamu	1,500,000.00	1,849,700.00	123.31%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	27,510,000.00	16,217,000.00	58.95%
Belanja Pakaian Seragam Dinas	32,500,000.00	32,206,500.00	99.10%
Belanja Jasa	356,325,000.00	332,330,579.00	93.27%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	105,350,000.00	104,122,000.00	98.83%
Belanja Jasa Pelayanan Non Medis	121,800,000.00	110,310,500.00	90.57%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Jasa Kantor	124,000,000.00	113,281,579.00	91.36%
Belanja Jasa Pembuatan Materi Multimedia	4,500,000.00	4,506,500.00	100.14%
Belanja Jasa Pengiriman	675,000.00	110,000.00	16.30%
Belanja Pemeliharaan	115,759,400.00	115,441,071.00	99.73%
Belanja Pemeliharaan dan Gedung	24,709,250.00	23,425,800.00	94.81%
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	39,911,250.00	40,196,406.00	100.71%
Belanja Saran dan Prasarana	41,138,900.00	41,817,350.00	101.65%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	10,000,000.00	10,001,515.00	100.02%
Belanja Perjalanan Dinas	68,750,000.00	32,773,200.00	47.67%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,750,000.00	4,868,000.00	35.40%
Belanja Kursus	5,000,000.00	-	0.00%
Belanja kerjasama dengan pihak ketiga	50,000,000.00	27,905,200.00	55.81%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,691,221,850.00	1,527,546,988.00	90.32%
PUSKESMAS ORO-ORO OMBO			
BELANJA PERSEDIAAN	935,922,000.00	889,299,075.00	95.02%
Belanja ATK	45,616,000.00	41,766,136.00	91.56%
Belanja Alat Listrik & Elektronika	6,305,500.00	6,329,000.00	100.37%
Belanja Materi	4,050,000.00	4,170,000.00	102.96%
Belanja Peralatan Kebersihan	51,684,000.00	64,025,820.00	123.88%
Belanja BBM dan Gas	2,612,500.00	2,400,000.00	91.87%
Belanja BHP dan Obat	114,629,000.00	114,968,031.00	100.30%
Pengelolaan Obat dan Embalage	3,013,500.00	209,000.00	6.94%
Biaya Cetak dan Penggandaan	136,523,500.00	135,549,705.00	99.29%
Belanja Rumah Tangga	45,929,000.00	64,058,103.00	139.47%
Belanja Makanan dan Minuman	54,045,000.00	53,681,500.00	99.33%
Belanja Seragam	13,200,000.00	17,329,200.00	131.28%
Belanja Alat dan Bahan Penanggulangan KLB COVID-19 :	458,314,000.00	384,812,580.00	83.96%
BELANJA JASA	301,950,000.00	277,031,635.00	91.75%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	147,700,000.00	136,882,500.00	92.68%
Belanja Jasa Pemusnahan Limbah Medis	16,000,000.00	18,183,000.00	113.64%
Belanja Jasa Kantor	10,800,000.00	10,468,629.00	96.93%
Belanja Media Promkes	22,500,000.00	6,650,000.00	29.56%
Belanja Jasa Retribusi Sampah	150,000.00	72,000.00	48.00%
Belanja Instruktur Senam	1,600,000.00	2,500,000.00	156.25%
Belanja Jasa Pelayanan Non ASN	97,200,000.00	96,050,000.00	98.82%
Biaya Berlangganan Jaringan	6,000,000.00	6,225,506.00	103.76%
Belanja Pemeliharaan	163,082,000.00	155,340,397.00	95.25%
Pemeliharaan Gedung	40,000,000.00	31,948,200.00	79.87%
Pemeliharaan Kendaraan Dinas :	50,582,000.00	48,438,747.00	95.76%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana :	72,500,000.00	74,953,450.00	103.38%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Perjalanan Dinas	54,000,000.00	37,621,500.00	69.67%
Bantuan Transport	2,000,000.00	830,000.00	41.50%
UHK	15,600,000.00	14,135,000.00	90.61%
Kontribusi Pelatihan	32,000,000.00	22,656,500.00	70.80%
Rujukan Luar Kota	4,400,000.00	-	0.00%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,454,954,000.00	1,359,292,607.00	93.43%
PUSKESMAS MANGUHARJO			
Belanja Persediaan	950,424,000.00	934,848,098.00	98.36%
Biaya Obat dan Embalance	286,740,000.00	285,253,023.00	99.48%
Biaya ATK	49,314,700.00	49,180,700.00	99.73%
Biaya Cetak dan Penggandaan	43,988,000.00	40,891,925.00	92.96%
Biaya Konsumsi	354,815,000.00	351,184,900.00	98.98%
Biaya Perangko, Matrei, dan Benda Pos Lainnya	1,650,000.00	1,232,000.00	74.67%
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas	37,982,200.00	37,960,000.00	99.94%
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	66,785,600.00	66,735,950.00	99.93%
Biaya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	33,450,000.00	27,241,500.00	81.44%
Biaya Peralatan Listrik dan Elektronik	11,613,000.00	11,567,600.00	99.61%
Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	51,820,000.00	51,335,000.00	99.06%
Biaya Sewa Peralatan	3,265,500.00	3,265,500.00	100.00%
Biaya Promosi	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
Belanja Jasa	319,750,000.00	298,544,558.00	93.37%
Biaya Jasa Kantor	77,650,000.00	67,781,708.00	87.29%
Kerjasama Pihak Ke Tiga	23,450,000.00	21,384,800.00	91.19%
Tenaga Upahan	84,850,000.00	84,850,000.00	100.00%
Jasa Pelayanan	133,800,000.00	124,528,050.00	93.07%
Belanja Pemeliharaan	328,380,000.00	321,279,766.00	97.84%
Pemeliharaan Gedung	170,000,000.00	167,309,766.00	98.42%
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor	23,000,000.00	19,945,000.00	86.72%
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	86,380,000.00	85,865,500.00	99.40%
Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik	5,500,000.00	5,437,500.00	98.86%
Biaya Pemeliharaan AC	13,500,000.00	12,859,000.00	95.25%
Biaya Pemeliharaan Komputer, Alat Ketik, dan Laptop	30,000,000.00	29,863,000.00	99.54%
Belanja Perjalanan Dinas	19,730,000.00	17,476,500.00	88.58%
Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,180,000.00	6,570,000.00	80.32%
Kontribusi Pelatihan	11,550,000.00	10,906,500.00	94.43%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,618,284,000.00	1,572,148,922.00	97.15%
PUSKESMAS PATIHAN			
Belanja Persediaan	709,764,600.00	666,726,808.00	93.94%
Belanja Alat Tulis Kantor	24,523,050.00	24,402,300.00	99.51%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6,836,250.00	6,836,250.00	100.00%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	18,421,800.00	18,421,800.00	100.00%
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	59,755,000.00	57,206,000.00	95.73%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37,658,000.00	24,900,200.00	66.12%
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	79,731,000.00	80,823,458.00	101.37%
Belanja Cetak	133,934,000.00	129,661,000.00	96.81%
Belanja Penggandaan	9,055,500.00	9,931,800.00	109.68%
PMT Pegawai	269,040,000.00	252,570,000.00	93.88%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,975,000.00	3,225,000.00	81.13%
Belanja makanan dan Minuman Tamu	2,355,000.00	3,075,000.00	130.57%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	18,000,000.00	16,500,000.00	91.67%
Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1,800,000.00	1,500,000.00	83.33%
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	31,680,000.00	25,074,000.00	79.15%
Belanja Makanan dan Minuman Senam LANSIA	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Belanja Pakaian Dinas	10,000,000.00	9,600,000.00	96.00%
Belanja Jasa	270,225,000.00	250,376,082.00	92.65%
Belanja Jasa Tenaga Upahan	102,425,000.00	101,830,000.00	99.42%
Belanja Jasa Non PNS	63,300,000.00	61,868,500.00	97.74%
Belanja Jasa Kantor	57,900,000.00	54,622,632.00	94.34%
Belanja Jasa Narasumber LANSIA	400,000.00	200,000.00	50.00%
Belanja Jasa Senam LANSIA	2,400,000.00	1,600,000.00	66.67%
Belanja Jasa PME	10,900,000.00	-	0.00%
Belanja Jasa Limbah Medis	24,900,000.00	23,254,950.00	93.39%
Belanja Jasa IPAL	1,000,000.00	-	0.00%
Belanja Jasa Laundry	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%
Belanja Pemeliharaan	82,532,500.00	81,511,650.00	98.76%
Belanja Pemeliharaan dan Gedung	48,100,000.00	44,625,500.00	92.78%
Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	6,932,500.00	5,156,150.00	74.38%
Belanja Sarana Prasarana Komputer dan Printer	22,500,000.00	24,500,000.00	108.89%
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana AC	5,000,000.00	7,230,000.00	144.60%
Belanja Perjalanan Dinas	48,906,500.00	41,788,000.00	85.44%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,400,000.00	10,089,000.00	65.51%
Belanja Kapasitas Pegawai	33,506,500.00	31,699,000.00	94.61%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,111,428,600.00	1,121,225,998.00	100.88%
PUSKESMAS DEMANGAN			
Belanja Persediaan	662,138,000.00	503,111,618.00	75.98%
Belanja Alat Tulis Kantor	50,689,000.00	44,370,000.00	87.53%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	20,194,000.00	18,798,200.00	93.09%
Belanja Materai dan Benda Pos	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720,000,00	720,000,00	100.00%
Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	75,171,000,00	58,593,200,00	77.95%
Belanja Makanan dan Minuman	172,365,000,00	129,974,900,00	75.41%
Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	36,300,000,00	36,300,000,00	100.00%
Belanja Bahan Obat Kimia	125,097,000,00	82,656,040,00	66.07%
Belanja Perlengkapan	20,200,000,00	16,569,500,00	82.03%
Belanja Alat Pelindung Diri	50,000,000,00	29,720,513,00	59.44%
Belanja Cetak dan Penggandaan	109,752,000,00	83,759,265,00	76.32%
Belanja Jasa	380,306,000.00	359,370,014.00	94.49%
Tagihan Telepon	4,800,000.00	812,434.00	16.93%
Tagihan air	5,400,000.00	4,321,860.00	80.03%
Tagihan listrik	48,000,000.00	45,433,120.00	94.65%
Surat kabar	2,400,000.00	1,440,000.00	60.00%
Jasa Pos Luar Kota Luar Propinsi	256,000.00	29,500.00	11.52%
Tenaga kebersihan sekaligus pengamanan pustu (2 org x 13 bulan)	24,700,000.00	24,700,000.00	100.00%
Tenaga kebersihan sekaligus pengamanan pustu taman (1 org x 13 bulan)	17,550,000.00	17,550,000.00	100.00%
Tenaga kebersihan sekaligus pengamanan induk (2 org x 13 bulan)	35,100,000.00	35,100,000.00	100.00%
Jasa laundry	24,000,000.00	19,373,000.00	80.72%
Jasa pengangkutan dan pemusnahan limbah medis	15,000,000.00	13,707,600.00	91.38%
Upah instruktur senam prolanis BPJS (1 org x 12 bulan)	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
Upah narasumber penyuluh prolanis BPJS Non PS (1 org x 12 bulan)	1,000,000.00	600,000.00	60.00%
Upah petugas parkir (1 org x 13 bulan)	9,100,000.00	9,100,000	100.00%
Upah instruktur senam hari jumat (2 kali x 11 bulan)	8,800,000.00	6,350,000.00	72.16%
Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Upahan BLUD	175,200,000.00	173,758,000.00	99.18%
Belanja Video Promkes	6,000,000.00	5,088,000.00	84.80%
Pemeriksaan Untuk Program PME Laboratorium (Sesuai Penawaran BBLK)	2,000,000.00	1,906,500.00	95.33%
Belanja Pemeliharaan	209,548,000.00	156,546,384.00	74.71%
Belanja Perjalanan Dinas	43,774,000.00	29,333,500.00	67.01%
Total Belanja Barang dan Jasa	1,295,766,000.00	1,048,361,516.00	80.91%

Tabel 5.2.1.2.3
Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD
 untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	2	3	4 = (3/2)
Belanja Barang dan Jasa RSUD	70,810,553,700.00	72,111,917,683.00	101.84%
5.2.2.01 Belanja Alat Tulis Kantor	180,009,000.00	264,565,850.00	146.97%
5.2.2.02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	120,193,263.00	138,124,800.00	114.92%
5.2.2.03 Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos	1,950,000.00	2,593,000.00	132.97%
5.2.2.04 Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih	1,005,764,612.00	988,845,585.00	98.32%
5.2.2.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15,754,200.00	8,315,129.00	52.78%
5.2.2.06 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20,870,000.00	20,665,000.00	99.02%
5.2.2.07 Belanja Peralatan dan Perlengkapan RT	111,355,000.00	24,439,758.00	21.95%
5.2.2.08 Belanja Bahan Kimia dan Obat-obatan	25,696,170,500.00	29,246,005,788.00	113.81%
5.2.2.09 Belanja Darah	1,224,000,000.00	1,051,920,000.00	85.94%
5.2.2.10 Belanja Linen	520,232,000.00	512,942,000.00	98.60%
5.2.2.11 Belanja Jasa Kantor	1,052,100,000.00	892,812,917.00	84.86%
5.2.2.12 Belanja Perpanjangan Ijin Radiologi	4,000,000.00	1,550,000.00	38.75%
5.2.2.13 Belanja Telepon	39,900,000.00	26,107,921.00	65.43%
5.2.2.14 Belanja Air	9,000,000.00	2,485,520.00	27.62%
5.2.2.15 Belanja Listrik	1,596,000,000.00	1,508,556,228.00	94.52%
5.2.2.16 Belanja Jasa Publikasi	200,400,000.00	189,511,185.00	94.57%
5.2.2.17 Belanja Surat Kabar/ Majalah/Televisi	15,120,000.00	11,565,000.00	76.49%
5.2.2.18 Belanja Kawat/Faxmil/ Internet	36,000,000.00	0.00	0.00%
5.2.2.19 Belanja Paket/Pengiriman	5,000,000.00	1,130,100.00	22.60%
5.2.2.20 Belanja Pembayaran Pajak dan Iuran	6,310,000.00	6,306,400.00	99.94%
5.2.2.21 Belanja Uji Laboratorium	0.00	0.00	0.00%
5.2.2.22 Belanja Jasa Sanitasi Lingkungan	1,450,512,000.00	1,647,191,608.00	113.56%
5.2.2.23 Belanja Jasa Pelayanan Medis	28,500,000,000.00	28,491,249,873.00	99.97%
5.2.2.24 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)	30,000,000.00	10,450,000.00	34.83%
5.2.2.25 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	630,100,000.00	567,126,700.00	90.01%
5.2.2.26 Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	735,264,000.00	415,093,916.00	56.46%
5.2.2.27 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	11,825,000.00	8,912,000.00	75.37%
5.2.2.28 Belanja Penggantian Suku Cadang	64,590,000.00	44,602,813.00	69.06%
5.2.2.29 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumnas Kendaraan Bermotor	60,538,400.00	35,537,792.00	58.70%
5.2.2.30 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor	13,550,000.00	12,268,400.00	90.54%
5.2.2.31 Belanja Cetak dan Penggandaan	813,958,000.00	775,616,271.00	95.29%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

5.2.2.32 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	60,500,000.00	62,278,200.00	102.94%
5.2.2.33 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	391,140,000.00	277,030,404.00	70.83%
5.2.2.34 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	310,446,000.00	297,140,900.00	95.71%
5.2.2.35 Belanja Makanan dan Minuman Pasien	2,796,924,000.00	1,835,112,730.00	65.61%
5.2.2.36 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	91,359,000.00	90,519,000.00	99.08%
5.2.2.37 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	246,680,000.00	240,057,074.00	97.32%
5.2.2.38 Belanja Bantuan Transport	18,542,000.00	4,863,408.00	26.23%
5.2.2.39 Belanja Akomodasi	5,718,000.00	383,500.00	6.71%
5.2.2.40 Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	189,500,000.00	166,317,835.00	87.77%
5.2.2.41 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	645,954,600.00	682,915,225.00	105.72%
5.2.2.42 Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	0,00	0,00	0.00%
5.2.2.43 Belanja Pemeliharaan Saluran/Drainase/ Gorong-Gorong (Pematusan Air Hujan)	31,075,000.00	0.00	0.00%
5.2.2.44 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	250,144,125.00	227,077,870.00	90.78%
5.2.2.45 Belanja Pemeliharaan Mesin	245,009,000.00	116,096,000.00	47.38%
5.2.2.46 Belanja Pemeliharaan Alat Pertamanan	150,000,000.00	195,035,600.00	130.02%
5.2.2.47 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	580,230,000.00	620,677,747.00	106.97%
5.2.2.48 Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolah Limbah Cair	66,200,000.00	31,193,000.00	47.12%
5.2.2.49 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih	157,210,000.00	115,254,680.00	73.31%
5.2.2.50 Belanja Pemeliharaan Laundry	237,286,000.00	107,692,256.00	45.39%
5.2.2.51 Belanja Pemeliharaan Instalasi Gizi	32,165,000.00	2,475,400.00	7.70%
5.2.2.52 Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	120,000,000.00	129,870,100.00	108.23%
5.2.2.53 Belanja Pemeliharaan Hydran	5,000,000.00	2,800,000.00	56.00%
5.2.2.54 Belanja Souvenir	5,000,000.00	0,00	0.00%
5.2.2.55 Belanja KIR	765,000.00	635,200.00	83.03%
5.2.2.56 Belanja Pemeliharaan Software	3,240,000.00	0,00	0.00%

5.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	16.145.485.000,00	11.938.091.671,53	74,30%	15.422.819.810,08

Realisasi belanja hibah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.938.091.671,53 atau 74,30% yang berarti Rp4.207.393.328,47 atau 25,70% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.145.485.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/245/2019 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor ; 400-401.202/245/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan naskah perjanjian Hibah daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari belanja tidak langsung pada BPKAD selaku SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.3
Belanja Hibah
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Hibah OPD BPKAD SKPKD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.4.05.01 Hibah kepada KORPRI	168.250.000,00	168.250.000,00	100,00%	168.250.000,00
5.1.4.05.03 Hibah kepada KONI	1.000.000.000,00	495.444.189,53	49,54%	5.606.792.820,08
5.1.4.05.04 Hibah kepada Pramuka	308.050.000,00	307.507.500,00	99,82%	305.462.750,00
5.1.4.05.05 Hibah kepada PMI	2.348.054.000,00	2.234.224.982,00	95,15%	968.116.250,00
5.1.4.05.06 Hibah kepada MUI	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00
5.1.4.05.07 Hibah kepada BAZ	388.615.000,00	388.615.000,00	100,00%	388.615.000,00
5.1.4.05.11 Hibah kepada Dewan Pendidikan	175.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.15 Hibah kepada GOW	15.000.000,00	0,00	00,00%	808.550.000,00
5.1.4.05.16 Hibah kepada Dewan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.17 Hibah kepada GOPTKI	15.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.19 Hibah Pengamanan Kepada Polresta	850.000.000,00	850.000.000,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.20 Hibah Pengamanan kepada Kodim	179.955.000,00	179.955.000,00	100,00%	179.955.000,00
5.1.4.05.28 Bantuan Operasional PAUD (DAK)	4.685.400.000,00	3.692.100.000,00	78,80%	4.019.720.990,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Hibah OPD BPKAD SKPKD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.4.05.34 Hibah kepada ORKEMAS/LSM	89.500.000,00	0,00	00,00%	35.000.000,00
5.1.4.05.35 Hibah kepada Den POM Pengamanan Terpadu	129.409.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.41 Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah madrasah Diniyah (BOSDA Madin)	1.086.240.000,00	953.640.000,00	87,79%	0,00
5.1.4.05.44 Hibah kepada PGRI	142.000.000,00	0,00	00,00%	100.000.000,00
5.1.4.05.48 Hibah kepada Persatuan Purnawirawan	0,00	0,00	00,00%	10.000.000,00
5.1.4.05.50 Hibah kepada LKP2 TPA/TPQ	1.586.400.000,00	1.586.400.000,00	100,00%	1.586.400.000,00
5.1.4.05.54 Hibah kepada Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan	0,00	0,00	00,00%	10.000.000,00
5.1.4.05.55 Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100.000.000,00	0,00	00,00%	100.000.000,00
5.1.4.05.56 Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	200.357.000,00	0,00	00,00%	200.357.000,00
5.1.4.05.57 Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia	196.855.000,00	196.855.000,00	100,00%	130.000.000,00
5.1.4.05.59 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	676.400.000,00	326.200.000,00	48,23%	555.600.000,00
5.1.4.05.60 Hibah kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Kota Madiun	1.389.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
5.1.4.05.61 Hibah kepada Perkumpulan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta (PGPS)	151.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
TOTAL	16.145.485.000,00	11.938.091.671,53	73,94%	15.422.819.810,08

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 =(3/2)	5
Bantuan Sosial	21.045.508.000,00	12.854.873.000,00	61,08%	15.001.277.870,00

Realisasi belanja bantuan sosial Per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.854.873.000,00 atau 61,08% yang berarti Rp8.190.635.000,00 atau 38,91% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp21.045.508.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/245/2019 tentang Badan/ Lembaga/ Organisasi/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Bantuan Sosial OPD BPKAD SKPKD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	9.095.284.000,00	6.732.010.000,00	74,02%	7.841.779.870,00
5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	11.670.224.000,00	6.036.763.000,00	51,73%	7.092.630.000,00
5.1.5.04 Bantuan Sosial yang tidak dapat di rencanakan	280.000.000,00	86.100.000,00	30,75%	66.868.000,00
Total	21.045.508.000,00	12.854.873.000,00	61,08%	15.001.277.870,00

Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat terdiri bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah, kelompok guru dan pegawai sekolah swasta, panti asuhan, beasiswa mahasiswa dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Belanja Sosial kepada anggota masyarakat terdiri bantuan sosial kepada perintis kemerdekaan, pengabdian Tokoh Masyarakat, jambanisasi, bantuan sosial akibat bencana, bantuan pangan non tunai (BPNT), kinerja guru TK/PAUD Non PNS (BK Prop), Bantuan Sosial Insentif guru dan tenaga kependidikan swasta di lembaga PAUD, SD dan SMP. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan terdiri dari bantuan sosial untuk orang lanjut usia dan bantuan sosial untuk orang terlantar.

5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal	200.671.333.488,41	191.011.897.074,57	95,19%	307.800.742.344,06

Realisasi belanja langsung jenis belanja modal Per 31 Desember 2020 sebesar Rp191.011.897.074,57 atau 95,19% yang berarti Rp9.659.436.413,84 atau 4,81% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp200.671.333.488,41. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja Modal Per 31 Desember 2020 sebesar Rp191.011.897.074,57 dibandingkan dengan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2019 sebesar Rp307.800.742.344,06 terjadi penurunan sebesar Rp116.778.845.269,49 atau terjadi penurunan sebesar 61,14%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2
Belanja Modal
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.01 Tanah	3.585.000.000,00	1.972.500.000,00	55,02%	0,00
5.2.3.02 Peralatan & mesin	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,75
5.2.3.03 Gedung & bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26
5.2.3.04 Jalan, irigasi, jaringan	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80
5.2.3.05 Aset tetap lainnya	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00
5.2.3.06 Aset lainnya	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00
Total	200.671.333.488,41	191.011.897.074,57	95,19 %	307.800.742.344,06

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	3.585.000.000,00	1.972.500.000,00	55,02%	0,00

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp1.972.500.000 atau 55,02% yang berarti Rp1.612.500.000,00 atau 44,97% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.585.000.000,00. Realisasi belanja modal Tanah APBD sebesar Rp1.972.500.000,00 pada BPKAD berupa pembelian tanah seluas $\pm 3.550 \text{ m}^2$ dari kepemilikan Hak Milik atas nama Bok Somoprawiro yang terletak di Jl. Manis Raya, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo. Pengadaan tanah dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli dan disepakati kedua belah pihak. Adapun pembelian tanah dimaksudkan untuk kepentingan umum yaitu bangunan Rusunawa di Kota Madiun.

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.549.937.238,00 atau 94,85% yang berarti Rp3.718.873.338,00 atau 5,15% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp72.268.810.576,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.549.937.238,00 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp68.460.669.520,00 terjadi penurunan sebesar Rp89.267.718,00 atau 0,13%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,00
5.2.3.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	1.007.500.000,00	933.680.000,00	92,67%	202.260.000,00
5.2.3.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	10.868.276.920,00	10.668.319.150,00	98,16%	9.432.965.880,00
5.2.3.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	77.150.000,00	0,00	00,00%	248.501.000,00
5.2.3.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	149.855.000,00	148.807.110,00	99,30%	345.850.330,00
5.2.3.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	50.696.922.256,00	49.803.401.068,00	98,24%	32.350.751.490,00
Belanja Modal Alat Kantor BOS	0,00	0,00	00,00%	1.271.763.615,00
5.2.3.02.06 Belanja Modal Peralatan Studio/ Komunikasi	210.200.000,00	205.850.000,00	97,93%	6.432.321.210,00
5.2.3.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	8.067.769.000,00	5.508.583.213,00	68,28%	16.184.556.695,00
5.2.3.02.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium	81.400.000,00	73.560.000,00	90,37%	27.321.300,00
5.2.3.02.10 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas	1.109.737.400,00	1.098.713.900,00	99,01%	1.964.378.000,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.2.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	44.607.526.956,00	44.489.436.610,00	99.74%	6.251.611.673,00
Dinas Kesehatan KB	4.851.069.150,00	2.433.909.077,00	50.17%	5.136.996.033,00
RSUD	6.498.769.500,00	5.659.828.136,00	87.09%	14.744.259.150,00
Dinas PU TR	1.156.300.000,00	1.081.827.797,00	93.56%	601.561.000,00
Dinas Perkim	3.142.234.000,00	3.128.493.500,00	99.56%	3.390.616.400,00
Dinas Satpol PP	189.500.000,00	185.460.000,00	97.87%	0,00
BPBD	450.800.000,00	435.354.227,00	96.57%	580.973.270,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00%	288.524.500,00
Dinas Tenaga Kerja	0	0,00	0,00%	104.777.000,00
Dinas LH	648.171.000,00	519.383.000,00	80.13%	488.832.600,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00%	573.160.984,00
Dinas Perhubungan	3.701.187.400,00	3.686.891.700,00	99.61%	3.968.915.500,00
Dinas Infokom	1.299.450.000,00	1.281.689.900,00	98.63%	11.751.952.430,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00%	166.169.000,00
Dinas Budparpora	161.339.920,00	159.815.000,00	99.05%	207.943.000,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00%	492.143.540,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00%	29.409.500,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00%	66.600.000,00
Bagian Umum	2.614.570.000,00	2.612.245.000,00	99.91%	3.229.352.702,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00%	2.500.000,00
Bagian Perekkesra	25.000.000,00	24.279.000,00	97.12%	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00%	230.628.000,00
Sekretariat DPRD	316.809.900,00	313.777.808,00	99.04%	12.324.785.235,00
BKD	82.800.000,00	81.564.000,00	98.51%	190.749.850,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00%	88.269.000,00
Bependa	632.125.000,00	625.250.400,00	98.91%	139.076.160,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	109.275.000,00
BAPPEDA	198.000.000,00	196.700.000,00	99.34%	408.943.600,00
Kec Kartoharjo	197.300.000,00	196.350.000,00	99.52%	962.295.813,00
Kec Manguharjo	225.650.000,00	180.946.500,00	80.19%	507.082.230,00
Kec Taman	1.105.507.750,00	1.093.635.073,00	98.93%	1.091.436.850,00
Bakesbangpol	90.000.000,00	89.650.000,00	99.61%	0,00
Dinas Pertanian KP	44.700.000,00	44.350.010,00	99.22%	239.231.500,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Perdagangan	30.000.000,00	29.100.000,00	97.00%	92.598.000,00
Total	72.268.810.576,00	68.549.937.238,00	94,85%	68.460.669.520,00

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.326.461.602,57 atau 97,65% yang berarti Rp849.850.866,64 atau 2,35% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp36.176.312.469,21.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 OPD Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.176.312.469,21	35.326.461.602,57	97,65%	48.758.211.485,26

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.3.1
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

L A P O R A N K E U A N G A N T A H U N 2 0 2 0

Modal Gedung dan Bangunan OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	23.439.629.792,21	23,255,987,832.21	99.22%	29.005.304.970,12
Dinas Kesehatan KB	257.000.000,00	249,660,900.00	97.14%	1.335.076.743,88
RSUD	381.275.325,00	353,395,960.00	92.69%	2.288.896.366,75
Dinas PU TR	2.954.750.000,00	2,826,637,260.00	95.66%	2.882.629.500,00
Dinas Perkim	4.989.396.000,00	4,582,059,347.64	91.84%	8.073.486.219,51
Dinas Satpol PP	187.150.000,00	186,791,000.00	99.81%	172.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00		0.00%	85.940.000,00
Dinas LH	201.050.000,00	187,947,000.00	93.48%	697.636.000,00
Dispendukcapil	0,00		0.00%	23.650.000,00
Dinas Perhubungan	264.200.000,00	253,530,000.00	95.96%	
Bagian Umum	195.927.230,00	190,650,000.00	97.31%	0,00
Sekretariat DPRD	0,00		0.00%	378.536.561,00
BKD	0,00		0.00%	3.203.796.978,00
Kec Kartoharjo	2.015.584.122,00	1,998,621,825.00	99.16%	211.150.000,00
Kec Manguharjo	587.350.000,00	545,665,000.00	92.90%	311.333.146,00
Kec Taman	703.000.000,00	695,515,477.72	98.94%	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0.00	00,00%	88.275.000,00
Total	36.176.312.469,21	35,326,461,602.57	97.65%	48.758.211.485,26

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp80.833.932.839,20 atau 96,71% yang berarti Rp2.747.870.070,20 atau 3,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp83.581.802.909,20. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.04. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80
5.2.3.04.01 Belanja Jalan	53.246.289.636,60	50.972.703.200,00	95,73%	93.277.992.490,46
5.2.3.04.02 Belanja Modal Jembatan	60.000.000,00	46.760.000,00	77,93%	349.934.960,00
5.2.3.04.03 Belanja Modal Bangunan Air/ Irigasi	28.371.426.772,00	28.006.544.520,00	98,71%	87.920.138.780,34
5.2.3.04.04 Belanja Modal Instalasi dan Jaringan	1.904.086.500,00	1.807.925.119,00	94,95%	2.474.475.705,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.4.1
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	16.500.000,00	10.736.000,00	65,07%	170.899.452.331,74
Dinas PU TR	81.826.956.409,20	79.173.468.520,00	96,76%	8.120.038.323,21
Dinas Perkim	1.633.077.500,00	1.546.529.319,00	94,70%	0,00
Dinas LH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	307.791.141,85
Kecamatan Kartoharjo	68.509.000,00	66.659.800,00	97,30%	1.631.388.352,00
Dinas Pertanian KP	31.760.000,00	31.539.200,00	99,30%	3.063.871.787,00
Total	83.581.802.909,20	80.833.932.839,00	96,71%	184.022.541.935,80

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Tetap Lainnya	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.521.068.895,00 atau 83,99% yang berarti Rp290.022.889,00 atau 16,01% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.811.091.784,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.05. Belanja modal Aset Tetap lainnya	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00
5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	495.052.824,00
5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan BOS	0,00	0,00	00,00%	2.393030.052,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.5.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.650.229.476,00
Dinas Perumahan	0,00	0,00	00,00%	49.853.400,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	00,00%	188.000.000,00
Total	1.811.091.784,00	1.521.068.895,00	83,99%	2.888.082.876,00

5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Lainnya	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00

Realisasi belanja modal aset lainnya Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.807.996.500,00 atau 86,44% yang berarti Rp440.319.250,00 atau 13,56% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.248.315.750,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja

yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Belanja Modal Aset lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.06 01 Belanja modal Aset Lainnya	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00
5.2.3.06.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software	903.315.500,00	699.109.490,00	77,39%	1.245.371.905,00
5.2.3.06.02 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud DED	1.200.000.000,00	972.025.040,00	81,00%	1.096.295.060,00
5.2.3.06.03 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Studi Kelayakan (FS)	650.000.000,00	647.132.000,00	99,56%	147.350.000,00
5.2.3.06.04 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rencana Induk/ Master Plan	145.000.250,00	139.930.000,00	96,50%	499.999.562,00
5.2.3.06.05 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Hasil Kajian	350.000.000,00	349.799.970,00	99,94%	682.220.000,00
Total	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.6.1
Belanja Modal Aset Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Modal Aset Lainnya OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas PU TR	1.700.000.000,00	1.472.025.040,00	86,59%	849.826.560,00
Dinas Perkim	150.000.000,00	147.137.000,00	98,09%	369.320.000,00
Dinas Tenaga Kerja	152.490.500,00	152.360.500,00	99,91%	0,00
Dinas LH	50.000.000,00	49.799.970,00	99,60%	320.375.000,00

Modal Aset Lainnya OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Infokom	200.000.000,00	197.197.000,00	98,60%	1.076.999.562,00
Dinas Budparpora	145.000.250,00	139.930.000,00	96,50%	0,00
Dinas Perpustakaan	253.300.000,00	252.976.990,00	99,87%	98.739.905,00
BKD	0,00	0,00	00,00%	115.250.000,00
BAPENDA	200.000.000,00	0,00	0,00%	
BAPPEDA	397.525.000,00	396.575.000,00	99,76%	693.007.000,00
Total	3.248.315.750,00	2.807.996.500,00	86,44%	3.671.236.527,00

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	87.250.474.139,84	6.361.433.706,00	7,29%	118.877.262,00

Realisasi belanja tidak terduga Per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.361.433.706,00 atau 7,29% yang berarti Rp80.889.040.433,84 atau 92,71% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87.250.474.139,84.

Perincian realiasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.3.1
Belanja Tidak Terduga Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

OPD	Uraian	Jumlah
Dinas Kesehatan		3.959.737.264,00
	belanja mamin	1.152.635.000,00
	belanja reagen rapid tes	2.160.327.264,00
	belanja upah	167.750.000,00
	belanja desinfektan	307.575.000,00
	belanja mamin	2.700.000,00
RSUD		1.646.174.990,00
	belanja mamin	187.570.000,00
	belanja desinfektan	23.750.000,00
	belanja pengadaan APD Gown Reuse dan balaclava	175.725.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	belanja alat kebersihan	475.401.690,00	
	belanja alat kesehatan	76.472.000,00	
	belanja pengadaan bahan medis habis pakai	198.538.400,00	
	belanja bahan pembersih	291.405.900,00	
	belanja jasa konstruksi ruang tunggu phsyca distancing klinik	198.721.000,00	
	belanja perencanaan dan pembangunan ruang tunggu phsyca distancing klinik	9.858.000,00	
	belanja pengawasan pembangunan ruang tunggu phsyca distancing klinik	8.733.000,00	
BPBD			256.511.575,00
	belanja upah	24.000.000,00	
	belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor /rumah tangga	65.967.200,00	
	belanja upah	58.141.375,00	
Dinas Sosial			26.250.000,00
	bantuan transport	26.250.000,00	
SKPKD			3.607.900,00
	pengembalian bantuan keuangan terkait keg peringatan hari jadi ke 75 propinsi Jawa timur	3.607.900,00	
Dinas Kebudayaan			31.650.000,00
	penarikan kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah, uang sewa gedung wisma haji kota madiun	31.650.000,00	
Dinas Komunikasi dan Informasi			79.151.977,00
	belanja mamin	153.171.000,00	
	pengembalian belanja mamin	(3.732.723,00)	
	pengembalian btt dinas kominfo	(30.638.800,00)	
	pengembalian btt dinas kominfo	(39.647.500,00)	
Kecamatan Kartoharjo			123.600.000,00
	Belanja Upah	123.600.000,00	
Kecamatan Manguharjo			131.085.000,00
	Belanja Upah	131.085.000,00	
Kecamatan Taman			103.665.000,00
	Belanja Upah	103.665.000,00	
	Jumlah Total		6.361.433.706,00

5.2.4. BELANJA TRANSFER**5.2.4.1. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	700.062.000,00	700.062.000,00	100,00%	651.920.000,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2020 merealisasi belanja transfer bantuan keuangan tahun anggaran 2020 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp700.062.000,00 yang digunakan untuk bantuan keuangan kepada partai politik, Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 34 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Perincian realiasi belanja transfer bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.4.1
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020

Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.7.05.01 Belanja Bantuan kepada Partai Politik	700.062.000,00	700.062.000,00	100,00%	651.920.000,00
5.1.7.05.01 Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	91.984.000,00	91.984.000,00	100,00%	133.271.000,00
5.1.7.05.02 Belanja Bantuan kepada Partai PDIP	144.969.000,00	144.969.000,00	100,00%	133.697.000,00
5.1.7.05.03 Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	72.096.000,00	72.096.000,00	100,00%	81.228.000,00
5.1.7.05.04 Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	72.522.000,00	72.522.000,00	100,00%	66.496.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

5.1.7.05.05	Belanja Bantuan kepada Partai Nasdem	48.728.000,00	48.728.000,00	100,00%	43.858.000,00
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan kepada Partai Golkar	54.199.000,00	54.199.000,00	100,00%	42.568.000,00
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	15.832.000,00	15.832.000,00	100,00%	26.102.000,00
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	45.329.000,00	45.329.000,00	100,00%	32.943.000,00
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan kepada Partai Hanura	0,00	0,00	00,00%	27.936.000,00
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	22.079.000,00	22.079.000,00	100,00%	19.713.000,00
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	80.128.000,00	80.128.000,00	100,00%	26.709.000,00
5.1.7.05.12	Belanja Bantuan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	52.196.000,00	52.196.000,00	100,00%	17.399.000,00

5.3. PEMBIAYAAN

5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	223.649.613.318,81	223.649.613.313,81	100,00%	279.278.826.431,22

Anggaran dan realisasi tahun anggaran 2020 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 sebesar Rp223.649.613.318,81 . Sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2020 adalah sebesar realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp223.649.613.313,81 dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp279.278.826.431,22 terjadi penurunan sebesar Rp55.629.213.117,41 atau 19,91%.

5.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00%	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2020 tidak terdapat realisasi penerimaan pinjaman Daerah.

5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2020 terdapat realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Penanaman Modal , PTSP,Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp1.000.000,00 yang diperoleh dari setoran angsuran dari dana bergulir an. Sumira